



LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Website : www.pn-gresik.go.id / email : gresik.pn@gmail.com

Telp. (031) 51159931 – Fax. (031) 51159931

Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, kami dapat menyelesaikan tugas dengan membuat laporan kegiatan tahunan dalam lingkup peradilan umum dalam satuan kerja (Satker) pada Pengadilan Negeri Gresik yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, karena itu kami telah dapat menyusun laporan kegiatan tahunan untuk tahun anggaran 2023.

Penyusunan laporan kegiatan tahunan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2876 /SEK/OT.01.1/12/2022, tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 laporan ini bermaksud sebagai tolok ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam Tahun Anggaran berjalan apakah sudah dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian laporan kegiatan tahunan tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tugas selama satu tahun, semoga dapat dijadikan acuan untuk tahun yang akan datang dan akhirnya kami ucapkan terima kasih

Gresik, 16 Januari 2024

Ketua

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

NIP. 19711205 199603 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik	2
C. Rencana Strategis	3
BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA	5
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	5
B. Penyelesaian Perkara	6
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	6
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	6
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK	7
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	7
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	8
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	8
1. POSBAKUM	10
2. Sidang Keliling/ Pelanan Terpadu	11
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	12

BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	13
	A. Mutasi	17
	B. Promosi Jabatan	20
	C. Pensiun	23
	D. Diklat	24
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	29
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	31
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	36
	1. Perangkat Keras	37
	2. Perangkat Lunak	41
	3. Implementasi e- court	54
	4. Implemetasi SIPP	55
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	56
	1. Akreditasi Penjamin Mutu	56
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	65
	3. Inovasi Pelayanan Publik	66
BAB VI	PENGAWASAN	68
	A. Internal	68
	B. Evaluasi	71

BAB VII	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Rekomendasi	72
LAMPIRAN - LAMPIRAN		74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri gresik	9
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	13
Gambar 4.1	Rak Server	37
Gambar 4.2	Komputer Server	38
Gambar 4.3	Tampilan Perangkat Keras Server Pengolah Data dan Jaringan Komputer	38
Gambar 4.4	Mesin Fingerprint & Faceprint	40
Gambar 4.5	Website PN Gresik	41
Gambar 4.6	SIPP Web PN Gresik	42
Gambar 4.7	SIPP Local Versi 5.3.1	42
Gambar 4.8	Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)	43
Gambar 4.9	Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	44
Gambar 4.10	Direktori Putusan Mahkamah Agung	44
Gambar 4.11	Aplikasi E-Court	45
Gambar 4.12	Aplikasi Attendance Management Kehadiran Pegawai	45
Gambar 4.13	Aplikasi SAKTI	46
Gambar 4.14	Aplikasi PTSP+	47
Gambar 4.15	Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)	47
Gambar 4.16	Aplikasi Simari	48
Gambar 4.17	Aplikasi ERATERANG	48
Gambar 4.18	Aplikasi SIWAS	49
Gambar 4.19	Aplikasi E-IPLANS	49
Gambar 4.20	Aplikasi e-Berpadu	50
Gambar 4.21	Aplikasi SIPPN Menpan	51

Gambar 4.22	JDIH Pengadilan Negeri Gresik	51
Gambar 4.23	Aplikasi Gaji Web	52
Gambar 4.24	Diagram Sederhana Jaringan Komputer Pengadilan Negeri Gresik	53
Gambar 4.25	Pelayanan Informasi E-court	55
Gambar 5.1	Petikan Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu	58
Gambar 5.2	Penghargaan sebagai Instansi Pelayanan Publik Ramah Disabilitas Tahun 2023	59
Gambar 5.3	Sertifikat Penghargaan atas Pencapaian Tercepat III Rekonsiliasi Monsakti	60
Gambar 5.4	Penghargaan sebagai Instansi Pelayanan Publik Ramah Disabilitas Tahun 2023 oleh Bupati Gresik	61
Gambar 5.5	Piagam Penghargaan Peringkat Ke 2 EIS di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya	62
Gambar 5.6	Piagam Penghargaan atas pencapaian terbaik (99,4%) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya	63
Gambar 5.7	Piagam penghargaan atas Peringkat 3 Kategori POSBAKUM	64
Gambar 5.8	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66
Gambar 5.9	Pelayanan Anjungan Mandiri PTSP	67

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023	5
Tabel	2.2	Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023	5
Tabel	2.3	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2022 Yang Diputus Tahun 2023	6
Tabel	2.4	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023 (Maksimal 5 Bulan)	6
Tabel	2.5	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK	7
Tabel	2.6	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	7
Tabel	2.7	Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi	8
Tabel	3.1	Jumlah Pegawai	14
Tabel	3.2	Data Pegawai	15
Tabel	3.3	Mutasi Masuk	17
Tabel	3.4	Mutasi Keluar	19
Tabel	3.5	Promosi Jabatan	20
Tabel	3.6	Kenaikan Pangkat	21
Tabel	3.7	Kenaikan Gaji Berkala	22
Tabel	3.8	Pensiun	23
Tabel	3.9	Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	24
Tabel	4.1	Realisasi Anggaran Dipa 01	29
Tabel	4.2	Realisasi Anggaran Dipa 03	30
Tabel	4.3	Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023	31
Tabel	4.4	Gedung Bangunan Kantor	32
Tabel	4.5	Rincian Bangunan Rumah Dinas	32
Tabel	4.6	Kendaraan Roda 4	32

Tabel	4.7	Kendaraan Roda 2	33
Tabel	4.8	Kondisi Barang Barang Inventaris	34
Tabel	4.9	Buku Perpustakaan Pengadilan Negeri Gresik	36
Tabel	4.10	Perangkat Keras Pengelola Data dan Jaringan Komputer Server	39
Tabel	4.11	Perangkat Keras Pengaman Kantor	40
Tabel	4.12	Perangkat Keras Informasi Publik	40
Tabel	6.1	Nama Hakim Pengawas	70

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan kegiatan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas - tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain - lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah - langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan kegiatan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gresik sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang - undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan ;
2. Kebijakan peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran ;
4. Penyelenggaraan persidangan ;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan ;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau ;

7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah - langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan di bidang peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian - bagian. Tugas di bidang administrasi teknis dilaksanakan oleh aparatur teknis yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di bidang administrasi umum dilaksanakan oleh aparatur non teknis yudisial yaitu Sekretaris, Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanaan, dan Subbag Umum dan Keuangan.

Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi fisik gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan personil, ruang dan fasilitas lainnya. Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan dengan cara penataan dan menjaga kebersihan kantor, ketertiban budaya kerja pegawai dan penataan administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping itu dalam hal peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses penyelesaiannya tidak lebih dari 5 (lima) bulan setelah proses mediasi dinyatakan gagal dengan tidak mengesampingkan kualitas isi putusan.

Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan kantor dan Administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik - baiknya sesuai dengan keperluan / kebutuhan, yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI GRESIK

Visi adalah cita – cita yang ingin diraih atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gresik.

Visi Pengadilan Negeri Gresik mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik Yang Agung”

Misi adalah cara / strategi mencapai cita – cita atau sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gresik:

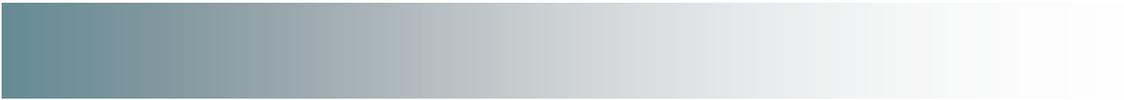
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gresik;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Untuk membangun kembali sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa, dalam wujud peradilan yang bersih, adil, benar, jujur dan netral maka perlu merencanakan langkah- langkah dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme kerja aparat peradilan dalam rangka mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
 - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
 - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Access To Justice);
 - Peningkatan kualitas pengawasan;
 - Peningkatan pelayanan informasi publik;
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur di Pengadilan Negeri Gresik
Pembinaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gresik (Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai) harus ditingkatkan lagi dengan cara



peningkatan pengetahuan (tingkat pendidikan aparatur peradilan baik pendidikan formal maupun non formal).

3. Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja bagi aparat peradilan khususnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, cermat, efisien, efektif, produktif, benar dan adil dan transparan.
4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan Teknologi Informasi sebagai alat bantu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELA IA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 2023 berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri Gresik (data per 31 Desember 2023) dapat digambarkan pada matrik keadaan perkara berikut:

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2023	PUTUS 2023	CABUT	SISA 2023	% PENYEL ESAIAN
1	Pidana Biasa	80	416	430	0	68	86%
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0%
3	Pidana Cepat/Ringan	0	176	176	0	0	100%
4	Pidana Lalu Lintas	0	4384	4384	0	0	100%
5	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	0%
6	Pidana Khusus Anak	0	10	10	0	0	100%
7	Pidana Praperadilan	0	6	5	0	1	83%

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2023	PUTUS 2023	CABUT	SISA 2023	% PENYELESAIAN
1	Perdata Gugatan	43	101	105	21	39	73%
2	Perdata Permohonan	3	231	224	32	10	96%
3	Perdata Khusus Niaga Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perdata Khusus Niaga PKPU	0	0	0	0	0	0
5	Perdata Khusus Niaga HKI	0	0	0	0	0	0
6	Perdata Khusus Niaga Actio Pauliana	0	0	0	0	0	0
7	Perdata Khusus Niaga Lain	0	0	0	0	0	0
8	Perdata Khusus PHI	1	11	10	0	1	83%
9	Perdata Perlawanan (Bantahan)	0	4	4	0	0	100%

10	Perdata Gugatan Sederhana	1	26	26	11	1	96%
11	Perdata Eksekusi	16	14	14	14	16	53%
12	Perdata Konsinyasi	0	17	17	0	0	100%

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sumber data: SIPP Pengadilan Negeri Gresik (data per 31 Desember 2023)

Dari Sisa Perkara perkara yang belum diputus tahun 2022 sebanyak 124 perkara. Sampai akhir tahun 2023, 124 perkara telah putus dan minutasi. Sehingga sisa perkara yang belum putus dan minutasi sebanyak 0 perkara.

Tabel 2.3 Jumlah Sisa Perkara Tahun 2022 Yang Diputus Tahun 2023

NO	PERKARA	Sisa Perkara Tahun 2022	Sisa Perkara Tahun 2022 yang Diselesaikan Tahun 2023	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	43	43	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth,
2	PIDANA	80	80	0	Pid.B, Pid.S, Pid.C, Pld.LL, Pid.Sus-Anak, Pid.Pra
3	PHI	1	1	0	Pdt.Sus-PHI
	JUMLAH	124	124	0	

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dimana ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Tabel 2.4 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023 (Maksimal 5 Bulan)

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	PERKARA MASUK TAHUN 2023	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	47	362	272	44	PDT G, PDT GS, PDT P, PDT.Bth
2	PIDANA	80	608	483	69	Pid.Biasa, Pid.Sus-Anak-Pid.Cepat
3	PHI	1	11	10	2	Pdt.Sus-PHI
	JUMLAH	128	981	765	115	

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Tabel 2.5 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

NO	PERKARA	PUTUS TAHUN 2023	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KETERANGAN
			BANDING	KASASI	PK	
1	PERDATA	358	73	6	16	
2	PIDANA	350	80	38	2	
3	PHI	9	0	3	0	
	JUMLAH	717	153	47	18	

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Gresik, jumlah perkara pidana (non lalu lintas) yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 80 perkara dari 350 perkara yang telah putus di tahun 2023. Sedangkan untuk perkara perdata, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 73 dari 358 perkara yang telah putus di tahun 2023, dan untuk perkara PHI, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 0 dari 9 perkara yang telah putus di tahun 2023

Sehingga jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 sebanyak 499 perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Gresik, jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada tahun 2023 adalah 6 perkara dari 59 perkara yang telah dilakukan keputusan mediasi.

Tabel 2.6 Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	MEDIASI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN GRESIK KELAS 1A	6	59	Berhasil dengan Akta perdamaian : 6 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 59 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi

Tabel 2.7 Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi

NO	NAMA SATUAN KERJA	DIVERSI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN GRESIK KELAS 1A	0	8	Berhasil dengan Akta perdamaian :0 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 0 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 8

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Yogyakarta, 14 September 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik untuk pertama kalinya mendapat penghargaan Akreditasi PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dan ISO 9001:2015 dari Dirjen Badilum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan predikat A (Excellent) Penghargaan Akreditasi ini di berikan langsung oleh Bpk. H. Suwardi, SH., MH. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (Bidang Non Yudisial), dan di terima oleh Ketua Pengadilan Negeri / Hub Industrial Gresik yaitu Bapak. Lucas Prakoso, S.H.,M. Hum periode 10 Febuari 2016 s.d 25 November 2021.

Berikutnya pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Ketua Bapak Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum. kembali Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapatkan penghargaan dengan predikat A (Excellent) yang di kirim langsung dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI.

Seritifikat ini diberikan dengan tujuan saat itu agar mendorong pengadilan negeri sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan.



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
DAN IA TAHUN 2022.

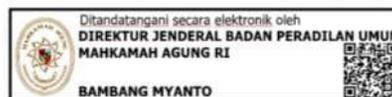
KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir
dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



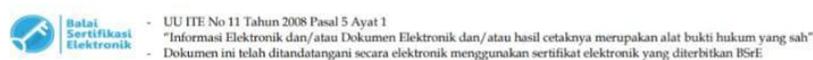
Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Gresik



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022**

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 72	dst.				
73	Pengadilan Negeri Gresik	IA	722	725	A
74 s/d 98	dst.				



Gambar 2.1 Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Gresik

1. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana / prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapatkan alokasi anggaran / Pagu Sebesar Rp. 31.200.000,- untuk Realisasi sebesar Rp. 31.200.000,-

2. Sidang Keliling / Pelayanan terpadu

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri tersebut sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Akan tetapi untuk Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik tidak melaksanakan sidang keliling karena tidak memiliki anggaran maupun zitting plaats untuk melaksanakan sidang keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan / permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

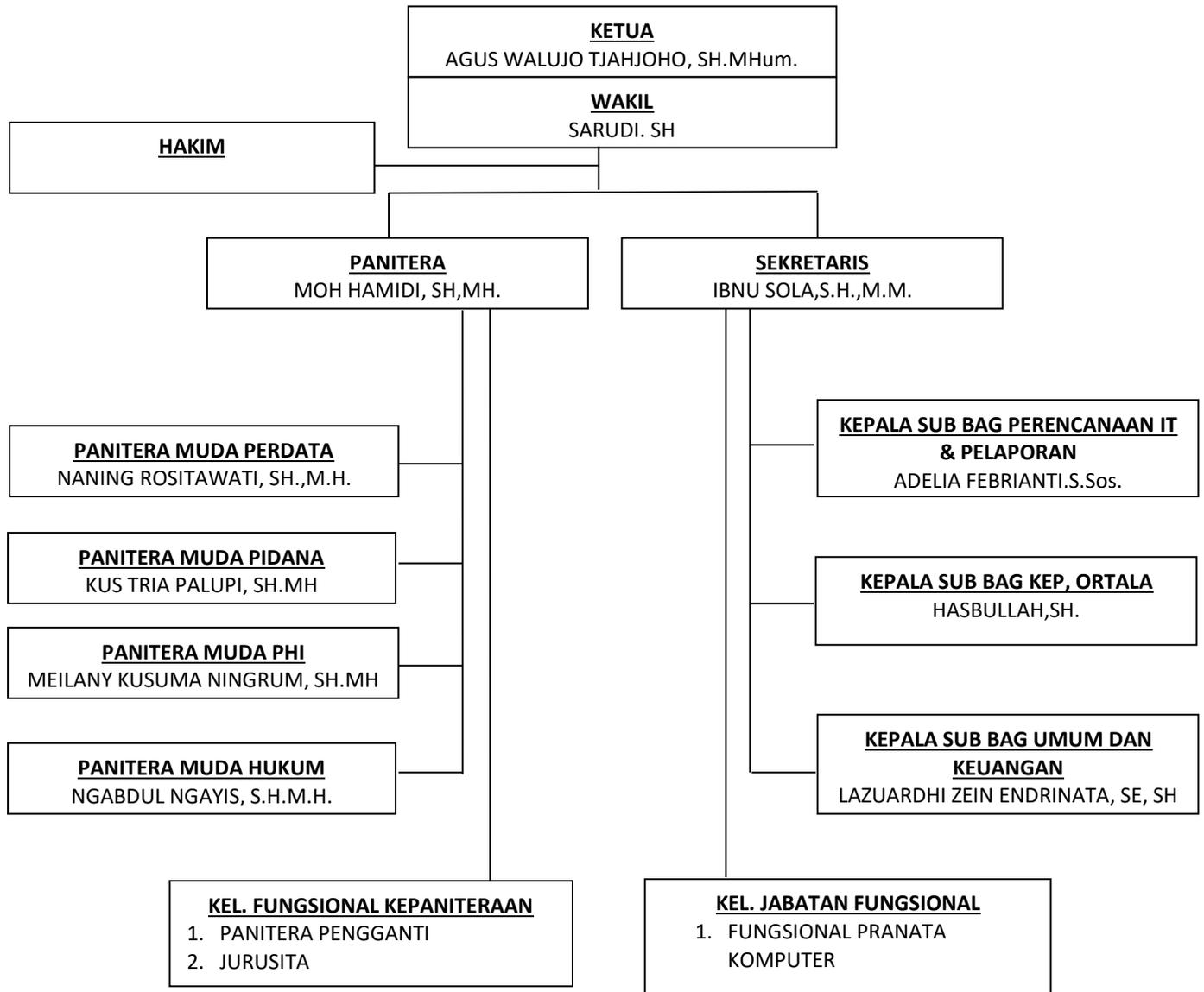
- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu Keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Pada saat Tahun 2023 kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri Gresik berjumlah 54 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2023 sebanyak 54 orang terdiri :

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai

Golongan	Hakim	Hakim Ad-Hoc PHI	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Staf	Jumlah
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	5	-	-	-	-	-	-	5
IV/b	9	-	2	-	-	-	-	11
IV/a	5	-	2	-	4	-	-	11
III/d	-	-	3	-	1	-	1	5
III/c	-	-	1	-	2	-	-	3
III/b	-	-	1	-	1	-	-	2
III/a	-	-	-	1	-	1	4	6
II/d	-	-	-	-	-	-	1	1
II/c	-	-	-	-	-	1	6	7
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	3	9	1	8	2	12	54

Tabel 3.2 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	AGUS WALUJO TIAHJONO, S.H., M.Hum. 196908181992031002	Ketua	
2	SARUDI,S.H. 196705091996031004	Wakil Ketua	
3	SRI HARIYANI, S H., M H. 196912111996032001	Hakim	
4	ETRI WIDAYATI, S.H., M.H. 19650517 198502 2 001	Hakim	
5	DYAH SUTJI IMANI, S.H. 197005251993032002	Hakim	
6	ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. 197012191993031001	Hakim	
7	FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. 19771022 201112 2 001	Hakim	
8	EFRIDA YANTI, S.H., M.H 19770327 200112 2 001	Hakim	
9	AGUNG NUGROHO SURYO S, S.H., M. Hum 19760207 200112 1 003	Hakim	
10	ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H. 19760306 200212 2 001	Hakim	
11	MOCH. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H. 19770527 200212 1 004	Hakim	
12	ARI KARLINA, S.H., M.H. 19800805200212 2 001	Hakim	
13	SRI SULASTUTI, S H. 19770924 200212 2 003	Hakim	
14	FIFIYANTI, S.H., M.H. 19771031 200212 2 007	Hakim	
15	ARIE ANDHIKA ADHIKRESNA, S.H., M.H. 197802052002121006	Hakim	
16	ARNI MUFIDA THALIB, SH, MH. 19790524 2003122 001	Hakim	
17	BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H. 19770507 200312 1 001	Hakim	
18	ANAK AGUNG AYU CHRISTIN A, S.H. M.H 19790817 200502 2 003	Hakim	
19	M. AUNUR ROFIQ, S.H., M.H. 197204182005021001	Hakim	
20	JAKA MULYATA,S.H.,M.M.,M.H. NIP.196206090220121202	Hakim Ad-Hoc PHI	

21	ABDI MUNAWAR DAENG M,S.Sos.,S.H.,M.H. NIP.197808070220160202	Hakim Ad-Hoc PHI	
22	WENDY AGUS BUDIAWAN,S.H.,M.H. NIP.198508280220160207	Hakim Ad-Hoc PHI	
23	MOH HAMIDI,S.H.,M.H. 196611071993031008	Panitera	
24	IBNU SOLA, S.H., M.M. 196709071993031001	Sekretaris	
25	NGABDUL NGAYIS, S.H. 197012061993031003	Panitera Muda Hukum	
26	NANING ROSITAWATI, S.H., M.H. 197202021993032001	Panitera Muda Perdata	
27	KUS TRIA PALUPI, S.H., M.H. 19750628 199403 2 001	Panitera Muda Pidana	
28	MEILANY KUSUMA NINGRUM, S.H.,M.H. 19810526 200704 2 001	Panitera Muda PHI	
29	ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H. 19650825 199203 1 005	Panitera Pengganti	
30	DWI WINDAYATI, S.H., M.H. 19640502 199203 2 003	Panitera Pengganti	
32	AKBARUR RAIHAN, S.H,M.H. 19760601 200604 1 005	Panitera Pengganti	
33	DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H. 19821112 200904 2 004	Panitera Pengganti	
34	DEDIK WANDONO,S.H. 198308022006041003	Panitera Pengganti	
35	ZULFIKAR NUR BARLIAN,S.H. 19860206 201212 1 001	Panitera Pengganti	
36	INDAH WARDAH, S.H.,M.H. 19820904 200604 2 005	Panitera Pengganti	
37	RINI SUSANTI, S.E., S.H., M.H. 198207232014082002	Panitera Pengganti	
38	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA, S.E., S.H. 19780531 200502 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	
39	HASBULLAH,S.H. 19790516 201408 1 003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
40	ADELIA FEBRIANTI, S.Sos. 19641222 199303 1 002	Kasubbag PTIP	
41	KUSWANDI,S.H. 19830826 201408 1 001	Jurusita Pengganti	
42	NURROSO 19710109 201408 1 001	Jurusita Pengganti	
43	DYAH AYU ROSITA DEWI, S.H. 19760429 200604 2 002	Analisis Perkara Peradilan	

44	FENIK ANDRIYAS MEGA SAFUTRI,S.H. 19890927 200912 2 001	Bendahara	
45	SATRYO WICAKSONO, S.T. 19921101 201903 1 004	Pranata Komputer Ahli Pertama	
46	MAZHRUR RAHMAN KUSUMA WARDANI, A.Md. 19920812 201903 1 006	Pengelola Sistem dan Jaringan	
47	ANITA PUJI LESTARI, A.Md. 19890929 202012 2 003	Pengadministrasi Register Perkara	
48	ANASTASIA MANIK, A.Md. 19930316 202012 2 007	Pengelola Sistem dan Jaringan	
49	MEIRISA YUNITA, S.H. 19940530 202203 2 011	Analisis Perkara Pera dilan	
50	ERINA RATNA BIDARI,S.H. 19950624 202203 2 001	Analisis Perkara Peradilan	
51	M.RISYAH FARRAS DEKA MAGHFIRA,S.H. 19961218 202203 1 007	Analisis Prerkara Peradilan	
52	SYINTHIA ROSA NAIBAHO,A.Md. 19960604 202203 2 009	Pengelola Perkara	
53	FRISKA ROSALINA,A.Md. 19930403 202203 2 013	Pengelola Barang Milik Negara	
54	RAFIKA LORENA,A.Md. 19960325 202203 2 009	Pengelola Perkara	
55	MEYTI AGNESTA SEMBIRING,A.Md. 19930515 202203 2 009	Pengelola Perkara	

A. MUTASI

MUTASI MASUK

Tabel 3.3 Mutasi Masuk

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT NO. & TGL
1	MAZHRUR RAHMAN KUSUMA WARDHANI, A.Md.	PENGELOL A SISTEM DAN JARINGAN	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN PT MALUKU UTARA	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5/SEK/Kp.I/SK/I/2023 Tanggal 3 Januari 2023
2	ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.	HAKIM	HAKIM PN SLEMAN	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1299/DJU/SK/KP.04.5/2/2 023 Tanggal 28 Februari

				2023
3	DYAH SUTJI IMANI,S.H.	HAKIM	HAKIM PN KRAKSAN	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1299/DJU/SK/KP.04.5/2/2 023 Tanggal 28 Februari 2023
4	ARIE ANDHIKA ADHIKRESNA,S.H.,M.H.	HAKIM	KETUA PN SUMENEP	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1299/DJU/SK/KP.04.5/2/2 023 Tanggal 28 Februari 2023
5	RINI SUSANTI,S.E.,S.H.,M.H,	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI PN TUBAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1332/DJU/SK/KP.04.5/4/2 023 Tanggal 17 April 2023
6	MOH HAMIDI,S.H.,M.H.	PANITERA	PANITERA PN JOMBANG	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2 023 Tanggal 17 April 2023
7	NANING ROSITAWATI, S.H.,M.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD PERDATA PN TULUNGAGUNG	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2 023 Tanggal 17 April 2023
8	NGABDUL NGAYIS,S.H.	PANMUD HUKUM	PANMUD HUKUM PN DEMAK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2 023 Tanggal 17 April 2023

MUTASI KELUAR

Tabel 3.4 Mutasi Keluar

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SETELAH NYA	SK PEJABAT NO. & TGL
1	RATNA MUTIA RINANTI,S.H.,M.H.	HAKIM	WAKIL KETUA PN SAMPANG	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP04.5/11/20 23 Tanggal 11 November 2022
2	AGUNG CIPTOADI,S.H.,M.H	HAKIM	HAKIM PN PALEMBANG	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP04.5/11/20 23 Tanggal 11 November 2022
3	RINA INDRAJANTI ,S.H.,M.H.	HAKIM	HAKIM PN SURAKARTA	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1299/DJU/SK/KP04.5/2/202 3 Tanggal 28 Februari 2023
4	MOH TAUFIK INDRA PRAMANA,S.H.,M.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM PN SURABAYA	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/202 3 Tanggal 17 April 2023
5	AGUS YULIANTO, S.H.,M.Hum.	PANMUD HUKUM	PANITERA PN PROBOLINGGO	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/202 3 Tanggal 17 April 2023
6	SISWANTO,S.H.	PANITERA PENGGANTI	PANMUD HUKUM PN LAMONGAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/202 3 Tanggal 17 April 2023
7	HANDRI MAMUDI,S.H.,M.H.	PANITERA	PANITERA PN MANADO	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/202 3 Tanggal 17 April 2023
8	KUS TRIA PALUPI,S.H.,M.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD PIDANA PN SIDOARJO	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/20 23 Tanggal 27 November 2023

B. PROMOSI JABATAN

Tabel 3.5 Promosi Jabatan

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	PROMOSI MENJADI	SK PEJABAT NO. & TGL
1	RATNA MUTIA RINANTI,S.H.,M.H.	HAKIM	WAKIL KETUA PN SAMPANG	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP04.5/11/2023 Tanggal 11 November 2022
2	AGUNG CIPTOADI,S.H.,M.H	HAKIM	HAKIM PN PALEMBANG	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP04.5/11/2023 Tanggal 11 November 2022
3	RINA INDRAJANTI ,S.H.,M.H.	HAKIM	HAKIM PN SURAKARTA	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1299/DJU/SK/KP04.5/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023
4	MOH TAUFIK INDRA PRAMANA,S.H.,M.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM PN SURABAYA	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023
5	SISWANTO,S.H.	PANITERA PENGGANTI	PANMUD HUKUM PN LAMONGAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023
6	AGUS YULIANTO, S.H.,M.Hum.	PANMUD HUKUM	PANITERA PN PROBOLINGGO	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023
7	SISWANTO,S.H.	PANITERA PENGGANTI	PANMUD HUKUM PN LAMONGAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1331/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023
8	KUSWANDI,S.H.	JURUSITA PENGGANTI	JURUSITA	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1332/DJU/SK/KP.04.5/4/2023 Tanggal 17 April 2023

9	ADELIA FEBRIANTI,S.Sos.	ANALIS TATA LAKSANA	KASUBBAG PTIP PN GRESIK	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1421/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 Tanggal 6 Oktober 2023
10	KUS TRIA PALUPI,S.H.,M.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD PIDANA PN SIDOARJO	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tanggal 27 November 2023

KENAIKAN PANGKAT

Tabel 3.6 Kenaikan Pangkat

No.	Nama	Jabatan	TMT	Usul
1	RATNA MUTIA RINANTI,S.H.,M.H.	Hakim	01-04-2023	IV/a-IV/b
2	ENI MARTININGRUM,S.E., S.H., M.H.	Hakim	01-04-2023	IV/a-IV/b
3	MOCH FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.	Hakim	01-04-2023	IV/a-IV/b
4	ARI KARLINA, S.H., M.H.	Hakim	01-04-2023	IV/a-IV/b
5	SRI SULASTUTI, S.H.	Hakim	01-04-2023	IV/a-IV/b
6	FIFIYANTI, S.H.,M.H.	Hakim	01-04-2023	IV/a-IV/b
7	ADELIA FEBRIANTI,S.Sos.	Analisis Tata Laksana	01-04-2023	III/a-III/b
8	NURROSO	Jurusita Pengganti	01-04-2023	II/b-II/c
9	DYAH SUTJI IMANI,S.H.	Hakim	01-10-2023	IV/b-IV/c
8	HASBULLAH,S.H.	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	01-10-2023	III/b-III/c
9	DWI NOVITA RAHAYU,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-10-2023	III/d-IV/a
10	DEDIK WANDONO, S.H.	Panitera Pengganti	01-10-2023	III/b-III/c
11	DIYAH AYU ROSITA DEWI,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	01-10-2023	III/c-III/d

KENAIKAN GAJI BERKALA

Tabel 3.7 Kenaikan Gaji Berkala

No.	Nama	Jabatan	TMT
1	M.AUNUR ROFIQ,S.H.,M.H.	Hakim	01-02-2023
2	A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI,S.H.,M.H.	Hakim	01-02-2023
3	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA,S.E.S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	01-02-2023
4	AGUS WALUJO TIAHJONO,S.H.,M.Hum.	Ketua	01-03-2023
6	IBNU SOLA,S.H.,M.M.	Sekretaris	01-03-2023
7	SUGENG AGUNG SISWOYO,S.H.,M.H.	Panmud Perdata	01-03-2023
8	KUS TRIA PALUPI,S.H.,M.H.	Panmud Pidana	01-03-2023
9	DWI WINDAYATI,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-03-2023
10	SUPRIYONO,S.H.	Jurusita	01-03-2023
11	SATRYO WICAKSONO,S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	01-03-2023
12	ADELIA FEBRIANTI,S.Sos.	Analisis Tata Laksana	01-03-2023
13	MEILANY KUSUMA NINGRUM, S.H.	Panmud PHI	01-04-2023
14	DWI NOVITA RAHAYU,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-04-2023
15	DIYAH AYU ROSITA DEWI,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	01-04-2023
16	INDAH WARDAH, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-04-2023
17	DEDIK WANDONO,S.H.	Panitera Pengganti	01-04-2023
18	HASBULLAH,S.H.	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	01-08-2023
19	KUSWANDI,S.H.	Jurusita	01-08-2023

20	NURROSO	Jurusita Pengganti	01-08-2023
21	FITRA DEWI NASUTION, S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2023
22	EFRIDA YANTI,S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2023
23	AGUNG NUGROHO SURYO S,S.H.,M.Hum.	Hakim	01-12-2023
24	ARNI MUFIDA THALIB, S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2023
25	BAGUS TRENGGONO,S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2023
26	SISWANTO,S.H.	Panitera Pengganti	01-12-2023

C. Pensiun

Tabel 3.8 Pensiun

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1	SUBANDRI,SH.	Kasubbag PTIP	01-01-2023	SEKRETARIS MA RI NO.00769/13001/AZ/09/22 TGL 26 SEPTEMBER 2022
2	Dra.SRIE SULANDJARI	Panitera Pengganti	01-01-2023	SEKRETARIS MA RI NO.00770/13001/AZ/09/22 TGL 26 SEPTEMBER 2022
3	SUPRIYONO,S.H.	Jurusita	27-05-2023	SEKRETARIS MA RI NO.00571/13001/AZ/08/23 TGL 31 AGUSTUS 2023

D. DIKLAT (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

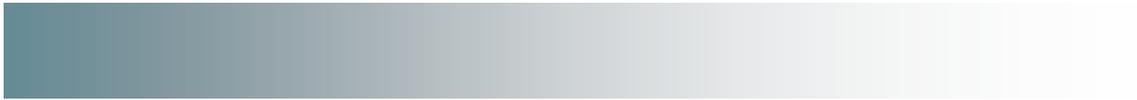
Tabel 3.9 Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah m mengikuti Diklat)

No	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		TANGGAL DIKLAT
			TEKNIS	NON TEKNIS	
1	Etri widayati, S.H., M.H.	Hakim	Peningkatan kompetensi Aparat Penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dibanding perpajakan gelombang I bagi hakim tingkat banding, Hakim tingkat pertama dan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti Peradilan Umum wilayah Pulau Jawa oleh badan Litbang Diklat Hukum dan peradilan mahkamah agung RI bekerjasama dengan direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI		06 Maret s.d. 17 Maret 2023
2	ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan XIX bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI		12 Oktober s.d 8 November 2023

3	SRI SULASTUTI, S.H.	Hakim	TEKNIS YUDISIAL Penistaan Agama bagi hakim peradilan umum dan peradilan militer seluruh Indonesia oleh badan Litbang Diklat Hukum dan peradilan mahkamah agung RI		27 februari s.d 11 Maret 2023
			Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Berdimensi KEPPH Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia		11 Juli s.d. 5 Agustus 2023
4	M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Berdimensi KEPPH Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan dengan Komisi Yudisial RI		11 Juli s.d. 5 Agustus 2023
5	IBNU SOLA,SH.,MH.	Sekretaris		Evaluasi Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wilayah Hukum Jawa Timur oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	28 Maret 2023
				Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran	19 - 21 Desember 2023

				Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur	
6	Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H	Kasub Bag Umum dan Keuangan		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur	19 - 21 Desember 2023
7	Adelia Febrianti, S.Sos	Kasub Bag PTIP		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur	19 - 21 Desember 2023
8	Satryo Wicaksono, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur	19 - 21 Desember 2023
9	MEIRISA YUNITA,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 angkatan VII dan X Tahun 2023 Oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI		28 Juni s.d. 14 Juli 2023
10	ERINA RATNA BIDARI,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen		28 Juni s.d. 14 Juli 2023

			Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 angkatan VII dan X Tahun 2023 Oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI		
11	M.RISYAH FARRAS DEKA MAGHFIRA ,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 angkatan VII dan X Tahun 2023 Oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	28 Juni s.d. 14 Juli 2023	
12	Friska Rosalina, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara		Evaluasi Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wilayah Hukum Jawa Timur oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	28 Maret 2023
13	Meyti Agnesta Sembiring, A.Md	Pengelola Perkara		Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level – 1 Wilayah Jawa Timur Kerjasama	29 Mei s.d. 17 Juni 2023



				Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BPSDM Kementerian PUPR RI Tahun 2023	
--	--	--	--	--	--

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Gresik diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip - prinsip yang terkandung dalam undang - undang tersebut di atas. Adapun Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri Gresik yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/APBN) adalah dikelola oleh Pejabat dan Pegawai Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima serta Staf Keuangan.

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Anggaran di Pengadilan Negeri Gresik terdiri dari dua DIPA, yaitu DIPA Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi (005.01) dengan kode satker 098150, dan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03) dengan kode satker 099138.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

DIPA 01

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dipa 01

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
			B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
1.	098150	PN. Gresik	9.586.204.000	2.137.613.000	65.950.000	9.366.590.599	1.979.335.097	65.201.003	96,79 %

DIPA 03

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dipa 03

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
			B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
1.	099138	PN. Gresik	-	173.797.000	-	-	163.930.380	-	94,32 %

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA 2023 pada Pengadilan Negeri Gresik dengan rincian sebagai berikut :

A. BELANJA BARANG DIPA 01 (098150)

1. Belanja Pegawai

- Pagu awal : 9.586.204.000
- Realisasi : 9.366.590.599
- **Sisa pagu : 219.613.401**

2. Belanja Barang

- Pagu awal : 2.137.613.000
- Realisasi : 1.979.335.097
- **Sisa pagu : 158.277.903**

3. Belanja Modal

- Pagu awal : 65.950.000
- Realisasi : 65.201.003
- **Sisa pagu : 748.997**

B. BELANJA BARANG DIPA 03 (099138)

1. Belanja Barang

- Pagu awal : 173.797.000
- Realisasi : 163.930.380
- **Sisa pagu : 9.866.620**

Penerimaan Negara

A. Realisasi penerimaan Negara Pengadilan Negeri Gresik (098150) TA 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 38.515.400,-
2. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	Rp. -
3. Penerimaan kembali persekot Gaji	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 38.515.400,-

B. Realisasi Penerimaan Negara Pengadilan Negeri Gresik (099138) TA 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 8.590.000,-
2. Pendapatan uang meja (Legas)	Rp. 6.520.000,-
3. Pendapatan ongkos perkara	Rp. 15.540.000,-
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp. 57.239.500,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 87.889.500,-

B. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

Selama periode tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Gresik mengelola sarana dan prasarana yang menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) meliputi:

Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023

✓ Tanah (Rumah Dinas)

Tabel 4.3 Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023

NO	Lokasi Tanah	Luas Tanah
1	Jl. Raya Permata No. 6 Gresik	4.410 M2
2	Jl. Panglima Sudirman No. 110 Gresik	1.615 M2
3	Jl. Basuki Rahmat No. 7 Gresik	597 M2
4	Sangkarapura Bawean	2.109 M2
5	Jl. Kartini XII No. 49,51,53,55,57	1.000 M2
6	Jl. Kartini XIV / 6 Gresik	200 M2
7	Jl. Kartini No. 234 Gresik	216 M2
8	Jl. Dr. Soetomo VI No. 6,8	400 M2

Adapun Rincian Gedung bangunan kantor tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.4 Gedung Bangunan Kantor

NO	Peruntukan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan
1	Gedung Kantor Baru	Jl. Raya Permata No. 6 Gresik	2.400 M2
2	Gedung Kantor Lama	Jl. Basuki Rahmat No. 7 Gresik	1.051 M2
3	Gedung Kantor Lama	Jl. Panglima Sudirman No. 110 Gresik	492 M2

Adapun Rincian Bangunan Rumah Dinas tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rincian Bangunan Rumah Dinas

NO	Peruntukan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan
1	Rumah Dinas Ketua Pengadilan	Jl. Raya Kartini 234 Gresik	70 M2
2	Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan	Jl. Raya Kartini XIV / 6 Gresik	70 M2
3	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 57	70 M2
4	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 55	70 M2
5	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 49	70 M2
6	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 51	70 M2
7	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 53	70 M2
8	Rumah Dinas Hakim	Jl. Soetomo VI / 8 Gresik	70 M2
9	Rumah Dinas Hakim	Jl. Soetomo VI / 6 Gresik	70 M2

✓ Kendaraan Roda 4

Tabel 4.6 Kendaraan Roda 4

N0	JABATAN / BAGIAN	JENIS KENDARAAN	PEROLEHAN	NOMOR POLISI
1	Ketua	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Hitam metalik	Pinjam Pakai Pemda	W 1447 AP
2	Wakil Ketua	Toyota Fortuner Putih	Pinjam Pakai Pemda	W 1189 BU
3	Panitera	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1564 AP

4	Sekretaris	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1562 AP
5	Panitera Muda Hukum	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1510 AP
6	Panitera Muda Perdata	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1563 AP
7	Ka Sub BagOrtala dan Tata Laksana	Daihatsu Terios Warna Hitam	APBN	W 682 AP
8	Ka Sub Umum dan Keuangan	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1509 AP
9	Panitera Muda Pidana	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1511 AP
10	Kuasa Pengguna Barang	Toyota Innova Warna Hitam	APBN	W 1267 AP
11	Kuasa Pengguna Barang	Toyota Kijang Warna Hijau	APBN	W 1686 AP
12	Kuasa Pengguna Barang	Daihatsu Terios Warna Silver	APBN	W 1106 AP

✓ Kendaraan Roda 2

Tabel 4.7 Kendaraan Roda 2

N0	JABATAN / BAGIAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI
1	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3135 AP
2	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor Supra X	W 3598 AP
3	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3834 AP
4	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3136 AP
5	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3867 AP

✓ Meubelair (Peralatan Kantor Lainnya)

Tabel 4.8 Kondisi Barang Barang Inventaris

**KONDISI BARANG-BARANG INVENTARIS
KANTOR PENGADILAN NEGERI GRESIK TAHUN 2023**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN			KETERANGAN
			BAIK	R. RINGAN	R. BERAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. BARANG BERGERAK					
1	Station Wargon	4	4	-	-	
2	Sepeda Motor	5	5	-	-	
3	Mesin Ketik Manual Portable	9	9	-	-	
4	Mesin ketik manual standard	2	3	-	-	
5	Mesin Ketik Listrik Portable	1	1	-	-	
6	Mesin Ketik Listrik					
6	Langewagon	2	2	-	-	
7	Lemari besi/ metal	5	5	-	-	
8	Lemari kayu	37	37	-	-	
9	Rak besi	25	25	-	-	
10	Rak Kayu	14	14	-	-	
11	Filing kabinet	20	20	-	-	
12	Brankas	3	3	-	-	
13	Kardex kayu	1	1	-	-	
14	Tabung pemadam kebakaran	3	3	-	-	
15	Fire Alarm	5	5	-	-	
16	CCTV- camera control	8	8	-	-	
17	Papan Visul/ Papan Nama	31	31	-	-	
18	White Board	14	14	-	-	
19	Peta	2	2	-	-	
20	Mesin Absen	3	3	-	-	
21	Hand metal Detector	1	1	-	-	
22	LCD Projektor/ Infocus	4	4	-	-	
23	Focusing Screen/ layar LCD	1	1	-	-	
24	Perkakas kantor lainnya	1	1	-	-	
25	Meja kerja besi/ metal	3	3	-	-	
26	Meja kerja kayu	136	135	1	-	
27	Kursi besi/ metal	198	195	3	-	
28	Kursi kayu	191	191	-	-	
29	Sice	6	6	-	-	
30	Bangku panjang	62	62	-	-	
31	Meja rapat	1	1	-	-	
32	Meja Komputer	12	12	-	-	
33	Meja telepon	2	2	-	-	
34	Meja Resepsionis	2	2	-	-	
35	Sketsa	10	10	-	-	
36	Jam mekanis	2	2	-	-	

37	Jam Elektronik	9	9	-	-
38	Mesin Penghisap debu	1	-	-	1
39	Lemari ES	2	2	-	-
40	A.C Split	51	51	-	-
41	Kipas angin	18	18	-	-
42	Tandon air	2	2	-	-
43	Televisi	3	3	-	-
44	Amplifier	2	2	-	-
45	Loudspeaker	2	2	-	-
46	Sound System	24	24	-	-
47	Karaoke	1	1	-	-
48	Microphone table stand	10	10	-	-
49	Unit Power Supply	1	1	-	-
50	Lambang Garuda Pancasila	5	5	-	-
51	Gambar Presiden @ Wakil	3	3	-	-
52	Tiang bendera	10	10	-	-
53	Kaca Hias	5	5	-	-
54	Palu sidang	4	4	-	-
55	Lambang Instansi	2	2	-	-
56	Vertikal Blind	3	3	-	-
57	Gordyin/kray	57	57	-	-
58	Intercom Unit	1	1	-	-
59	Telephone (PABX)	4	4	-	-
60	Facsimile	2	2	-	-
61	Mainframe (komputer jaringan)	4	4	-	-
62	Internet	1	1	-	-
63	P.C Unit	78	77	-	1
64	Laptop	29	20	-	9
65	Printer	26	26	-	-
66	Server	2	2	-	-
67	Hub	1	1	-	-
68	Rak server	1	1	-	-

Tabel 4.9 Buku Perpustakaan Pengadilan Negeri Gresik

JUMLAH BUKU PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

NO	KLARIFIKASI	SUB - SUB KELOMPOK KLARIFIKASI BIDANG	JUMLAH
1	2	3	4
1.	209I0000	Hukum Perdata	292
2.	209II0000	Hukum Dagang	284
3.	209III000	Hukum Adat	312
4.	209IV000	Hukum Agraria	106
5.	209V0000	Hukum Islam	56
6.	209VI000	Hukum Perburuan	31
7.	209VII00	Hukum Kewarganegaraan	26
8.	209VIII0	Hukum Pidana	569
9.	209IX000	Hukum Anak -anak	9
10.	209X000	Hukum Acara Perdata	81
11.	209XI000	Hukum Acara Pidana	168
12.	209XII00	Hukum perpajakan	27
13.	209XIII0	Hukum Administrasi	108
14.	209XIV0	Hukum Antar Golongan	20
15.	209XV00	Hukum Internasional Hukum Publik	91
16.	209XVI0	Internasional	25
17.	209XVII0	Hukum Tata Negara	998
18.	209XX00	Kriminologi	77
19.	209XXI0	Sosiologi	103
20.	209XXII0	Filsafat Hukum	49
21.	209XXIII	Hukum Lingkungan	64
22.	209XXIV0	Per Undang-Undangan	705
23.	209XXV0	Umum	1184
JUMLAH			4,896

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Upaya untuk mengaplikasikan teknologi informasi terhadap layanan di internal Pengadilan Negeri Gresik maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan memerlukan kebijakan pengelolaan sistem TI yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Memiliki manajemen informasi yang menjamin

akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting untuk mendorong terwujudnya visi Pengadilan Negeri Gresik: Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik yang Agung.

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang mencukupi merupakan syarat penting keberlangsungan pengelolaan teknologi informasi yang memadai.

Teknologi informasi merupakan faktor penting pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Negeri Gresik. Saat ini fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Gresik telah dioperasikan non-stop selama 24 jam setiap harinya, sehingga pengisian data dan akses informasi dapat diakses setiap waktu oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Gresik di lingkungan kantor. Berikut akan diulas secara detail mengenai pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Gresik.

a. Ruang Server



Gambar 4.1 Rak Server



Gambar 4.2 Komputer Server



Gambar 4.3 Tampilan Perangkat Keras Server Pengolah Data dan Jaringan Komputer

Pengadilan Negeri Gresik telah mengalokasikan secara khusus ruangan sebagai Data Center dan Network Operational Control (NOC). Ruangan tersebut telah dilengkapi dengan pendingin ruangan berjenis AC split sebanyak 2 unit dengan besaran 1 PK yang mendinginkan ruangan selama 24 jam setiap harinya secara bergantian.

- Perangkat keras pengelola data dan jaringan komputer server

Tabel 4.10 Perangkat Keras Pengelola Data dan Jaringan Komputer Server

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	Dedicated Server	<p>Model :Tower Fujitsu Primergy TX1320 Prosesor : Intel Xeon E2200/E-2100 Ram : 4 GB - 128 GB, DIMM (DDR4) HDD : 3.5-inch non hot-plug or 2.5-inch hot-plug SAS/SATA or 2.5-inch NVMe drives Max. 8x (4x + 4x) x 2.5-inch hot-plug Max. 2 x 3.5-inch non hot-plug SATA Not upgradeable in the field.</p> <p>Model : Desktop Fujitsu RX1330M1 Prosesor : Intel Xeon E3-1231v3 4C/8T 3.40 GHz 8 MB Ram : 4 Gb HD SAS 6G 300GB (2)</p>	2 Unit
2	Router	Mikrotik RouterBoard RB 1100	1 Unit
3	Wireless Concentrator	<p>Ruijie RAP6262(G) Outdoor (VENDOR)</p> <p>Ruijie RAP2200(E) Indoor (VENDOR)</p> <p>Ruijie AP720-L Indoor (VENDOR)</p>	<p>2 Unit</p> <p>10 Unit</p> <p>1 Unit</p>

Untuk perangkat keras server pada tabel di atas telah ditempatkan pada ruang khusus dan lemari server khusus dengan pintu kaca dan didukung dengan UPS 4000 VA/2000 W untuk melindungi dari listrik mati dan Generator/Genset 250 KVA.

Perangkat keras pengolah data berbentuk Mesin Absensi telah dikoneksikan dengan jaringan komputer Pengadilan Negeri Gresik.



Gambar 4.4 Mesin Fingerprint & Faceprint

- Perangkat keras pengaman kantor

Tabel 4.11 Perangkat Keras Pengaman Kantor

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	CCTV Camera	CCTV indoor dan outdoor	30 Unit
2	Digital Video Recorder (DVR)	Standalone DVR dengan HDD	5 Unit

Seluruh perangkat keras pada tabel di atas telah ditempatkan dalam satu tempat bersama perangkat keras pengelola data dan jaringan komputer.

- Perangkat keras informasi publik

Tabel 4.12 Perangkat Keras Informasi Publik

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	Flat Monitor / TV	40"/42"/50" LED TV	3 Unit
2	PC Antrian PTSP	Built Up	1 Unit
3	PC SIPP	Built Up	1 Unit
4	PC KIOS K SPKP / SPAK	Built Up	2 Unit
5	PC KIOS K ANDROID	Built Up	1 Unit

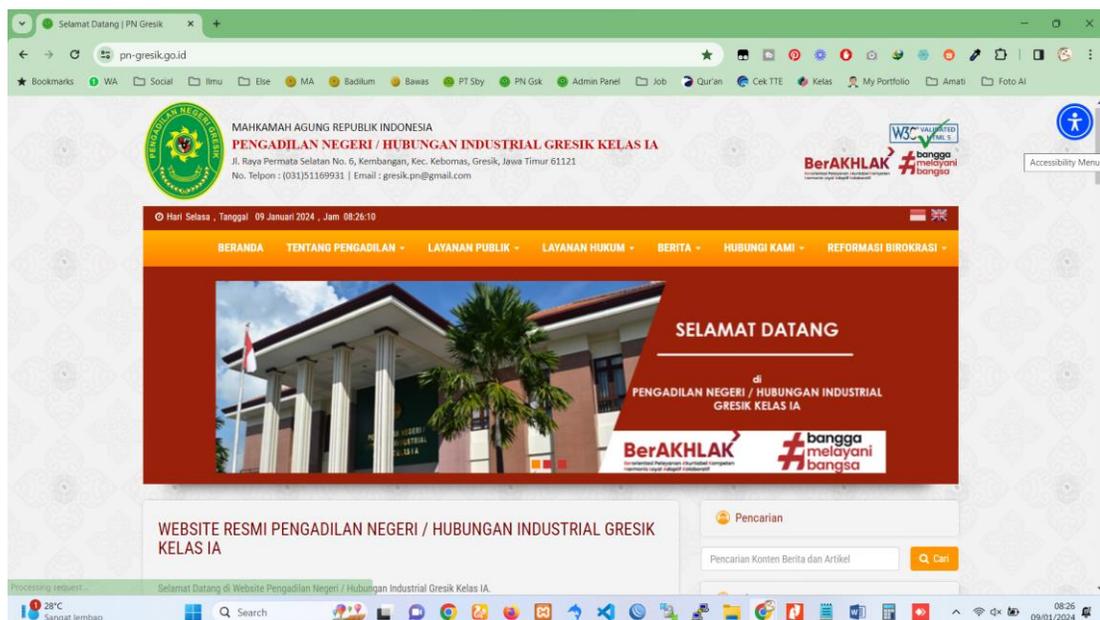
Perangkat keras informasi publik tersebut memiliki fungsi utama untuk menampilkan jadwal sidang dan pelacakan perkara bagi pengunjung Pengadilan Negeri Gresik. Perangkat tersebut terhubung dengan CPU yang terletak di lobi Informasi dan Pengaduan.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dimaksudkan adalah perangkat lunak yang dipergunakan dalam pengolahan data dan informasi pada Pengadilan Negeri Gresik. Berikut detail perangkat lunak yang dipergunakan :

a. Website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

www.pn-gresik.go.id berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita, persyaratan, informasi perkara, putusan dan pengumuman yang ada pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 4.5 Website Pengadilan Negeri Gresik

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Website : <https://sipp.pn-gresik.go.id/>

The screenshot displays the SIPP Web PN Gresik interface. At the top, there is a navigation menu with options like Beranda, Perdata Umum, Perdata Khusus, Pidana, Pidana Khusus, Jadwal Sidang, Laporan, and Delegasi. Below this, a section titled 'DATA SELURUH PERKARA' shows a table of cases. The table has columns for No, Nomor Perkara, Tanggal Register, Klasifikasi Perkara, Para Pihak, Status Perkara, Lama Proses, and Link. Five cases are listed, all registered on 05 Jan 2024. The cases involve various legal matters such as 'Pemisahan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak', 'Wali Dan Ijin Jual', 'Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam', 'Perlindungan Anak', and 'Penganiayaan'.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk	05 Jan 2024	Pemisahan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	Penggugat: Ahmad Rilal Tergugat: PT. Sentra Pangan Utama	Sidang pertama	4 Hari	[detail]
2	1/Pdt.P/2024/PN Gsk	05 Jan 2024	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: WIWIK PURWANINGSIH	Sidang pertama	4 Hari	[detail]
3	1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk	05 Jan 2024	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Penuntut Umum: NURUL ISTIANAH, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Sidang pertama	4 Hari	[detail]
4	2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk	05 Jan 2024	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: PARAS SETIO, S.H., M.H.LL. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Penetapan Musyawarah Diversi	4 Hari	[detail]
5	9/Pid.B/2024/PN Gsk	05 Jan 2024	Penganiayaan	Penuntut Umum: PARAS SETIO, S.H., M.H.LL.	Sidang pertama	4 Hari	[detail]

Gambar 4.6 SIPP Web PN Gresik

c. SIPP Local Host

Manajemen Administrasi di internal Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dijalankan oleh seluruh bagian Kepaniteraan. Hingga saat ini Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.3.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun dengan Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah dimuktahirkan setiap harinya.

The screenshot shows the SIPP Local Host interface. It features a dashboard with various statistics and a table of cases. The dashboard includes sections for 'DASHBOARD PERKARA [Statistik Perkara]', 'STATISTIK PERKARA ECOURT', and 'RASIO BEBAN PERKARA'. The table of cases lists various legal matters such as 'GUGATAN', 'PERMOHONAN', 'KEPALUTAN', 'PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG', 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL', 'PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL', and 'PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)'. The table has columns for No, Perkara, Sisa Bulan Lalu, Masuk, e-Court, Pulus, Rasio Penyelesaian Perkara, Sisa Perkara, and BHT.

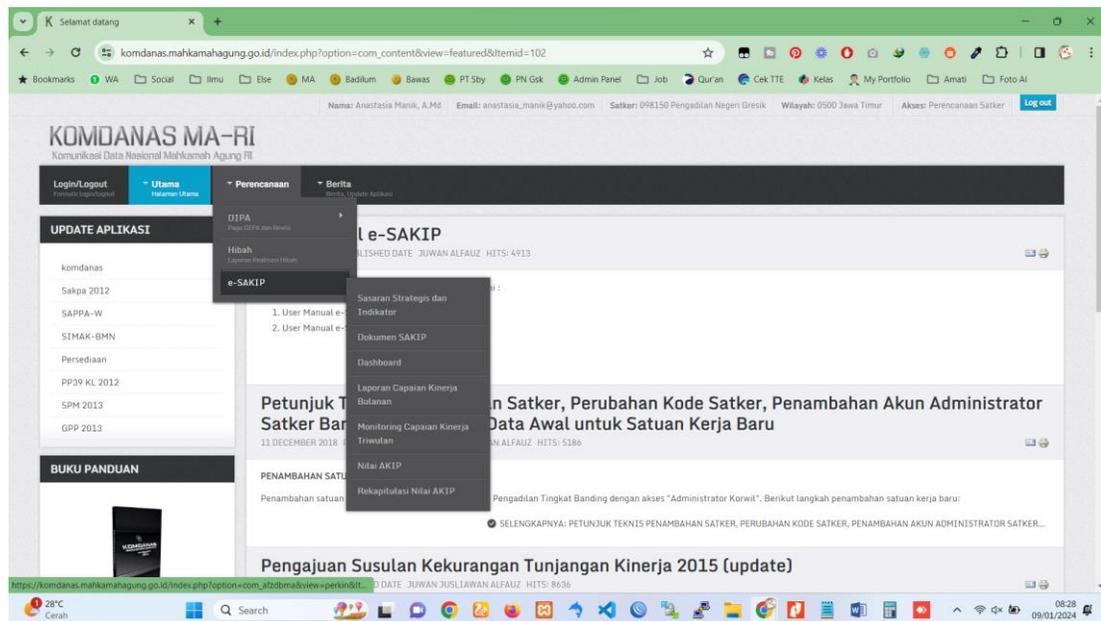
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Pulus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	38	2	2	-	8.00 %	40	-
2	PERMOHONAN	9	1	1	4	40.00 %	6	4
3	KEPALUTAN	-	-	-	-	0.00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2	1	1	-	0.00 %	3	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	1	-	-	-	0.00 %	1	-

Gambar 4.7 SIPP Local Versi 5.3.1

d. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

<https://komdanas.mahkamahagung.go.id>

Aplikasi ini digunakan untuk laporan pada Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

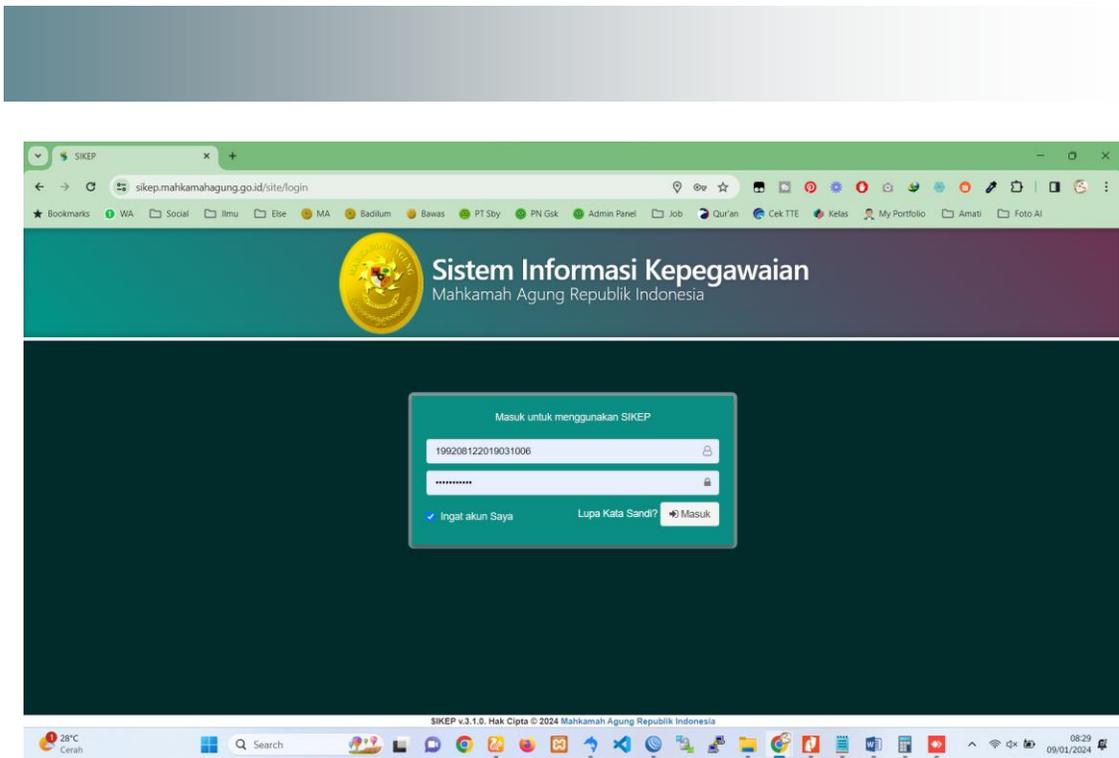


Gambar 4.8 KOMDANAS

e. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

<https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

Aplikasi yang digunakan untuk update data pegawai pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Untuk saat ini aplikasi tersebut mulai diterapkan untuk Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang nantinya proses kenaikan pangkan akan menggunakan sistem paperless yaitu tanpa hardcopy. Pada tahun 2023 terdapat penambahan / pengembangan fitur untuk input data ketidakhadiran pegawai seperti cuti tahunan, sakit, dll.

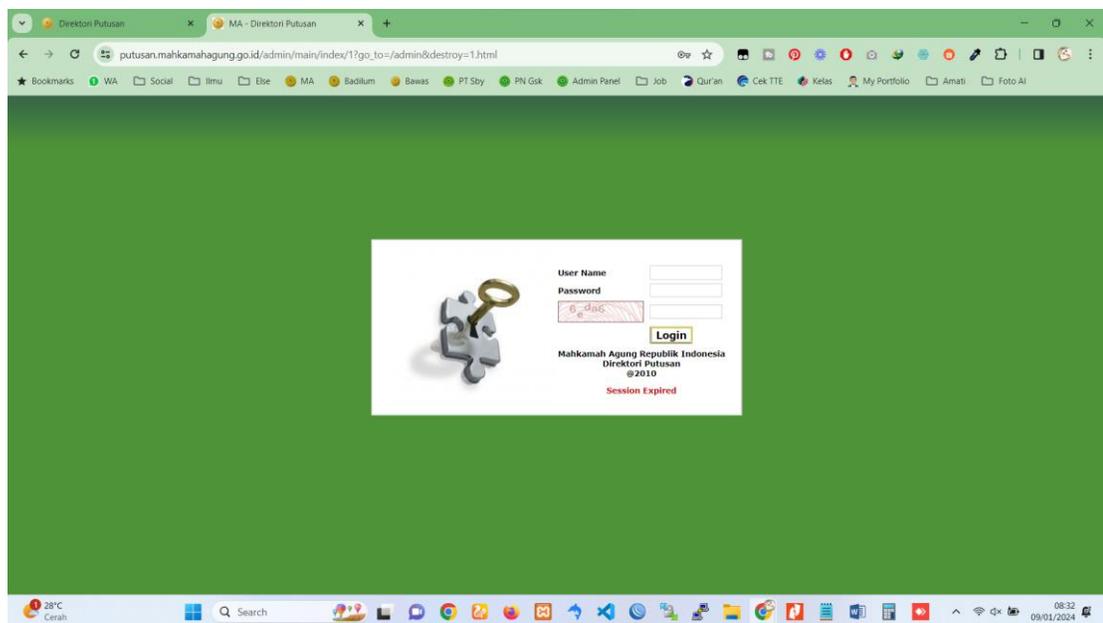


Gambar 4.9 SIKEP

f. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-gresik>

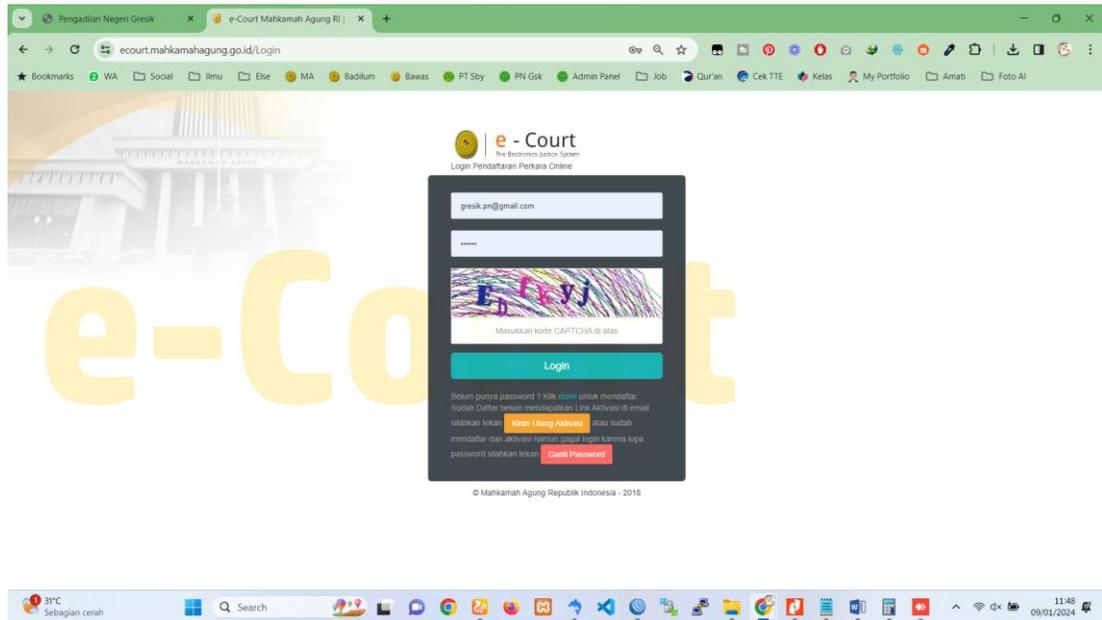
Aplikasi berbasis website untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi, maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.



Gambar 4.10 Direktori Putusan Mahkamah Agung

g. E-Court Mahkamah Agung RI

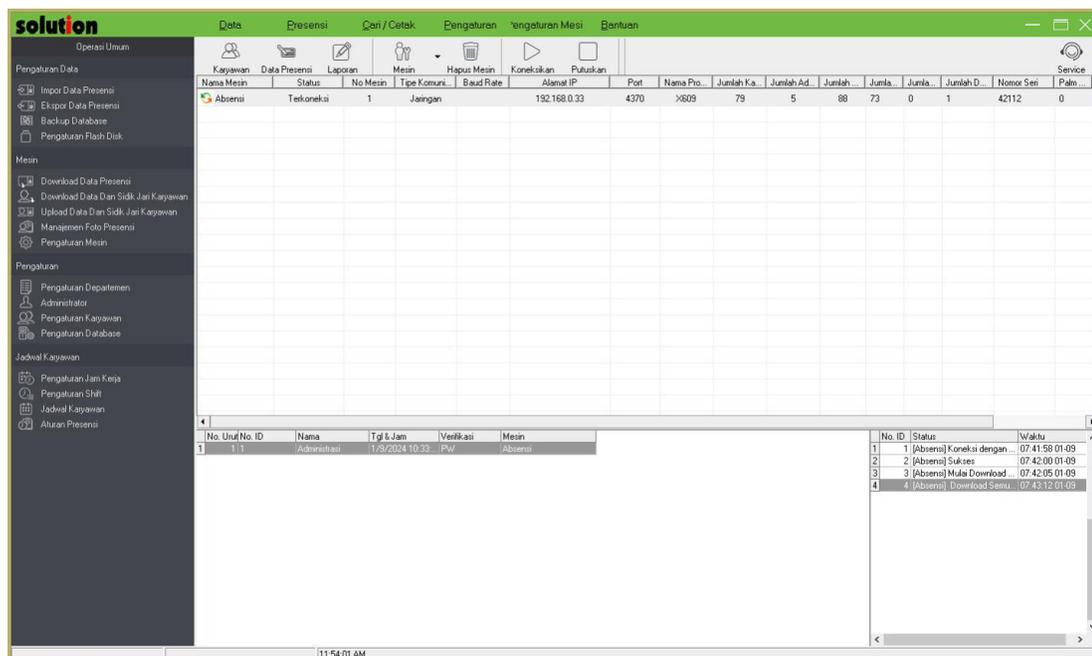
Aplikasi tersebut adalah suatu revolusi bagi dunia peradilan karena dalam aplikasi tersebut telah mendukung e-Filing (Pendaftaran Online), e- Payment (Pembayaran Online), e-Summons (Panggilan Elektronik) dan e-Litigasi (Persidangan Online).



Gambar 4.11 Aplikasi e-Court (Pendaftaran Perkara Online)

h. Aplikasi Attendance Management Kehadiran Pegawai

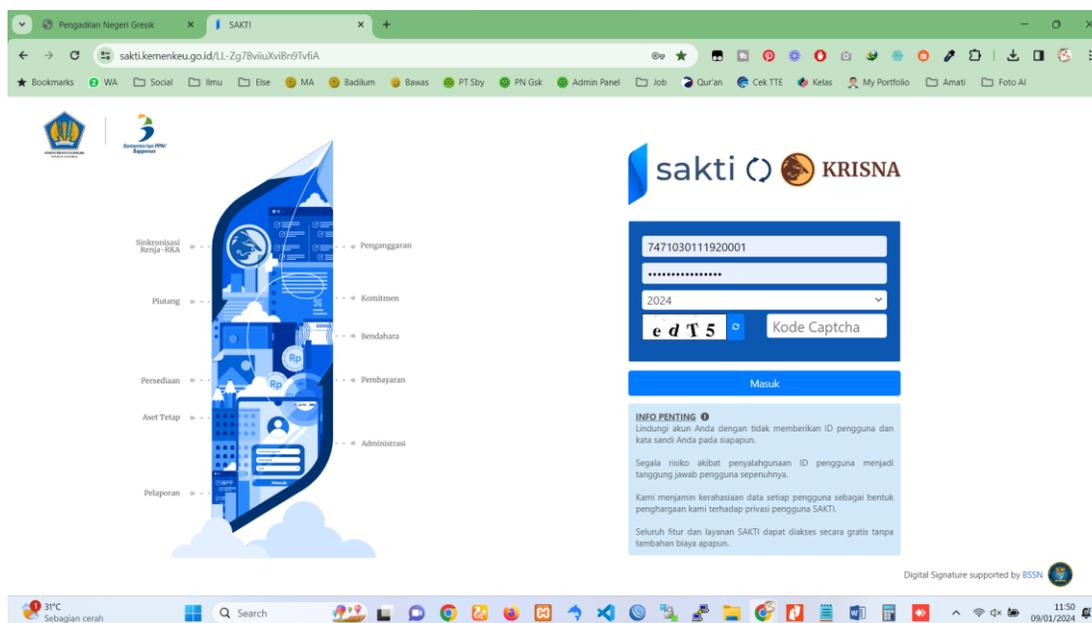
Aplikasi tersebut adalah absensi absen bagi seluruh pegawai menggunakan sidik jari.



Gambar 4.12 Aplikasi Attendance Management Kehadiran Pegawai

i. Aplikasi SAKTI

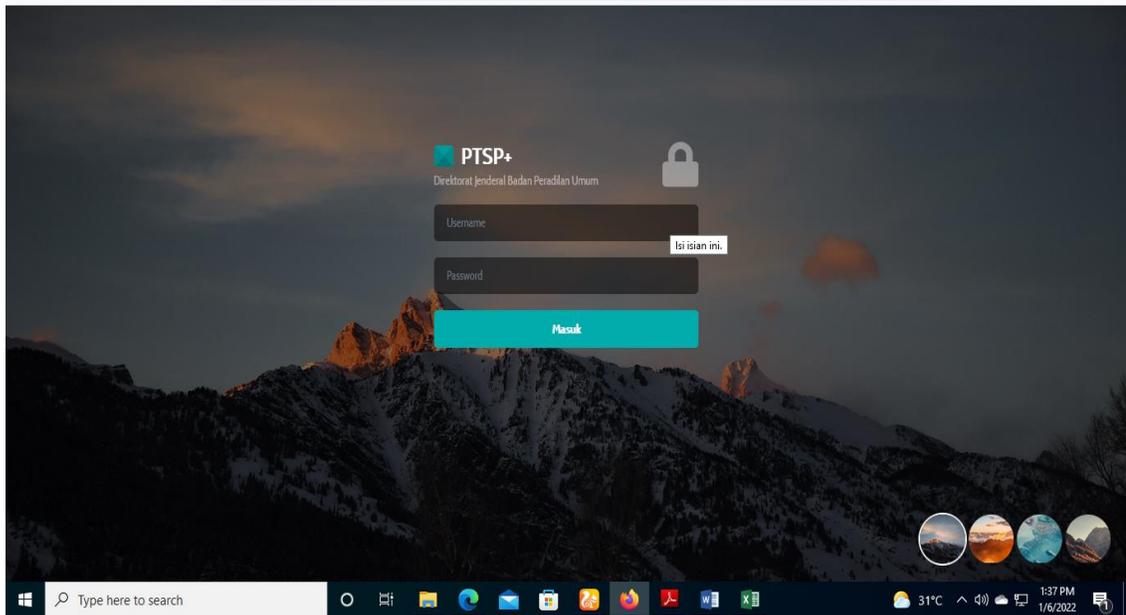
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran



Gambar 4.13 Aplikasi SAKTI

j. Aplikasi PTSP

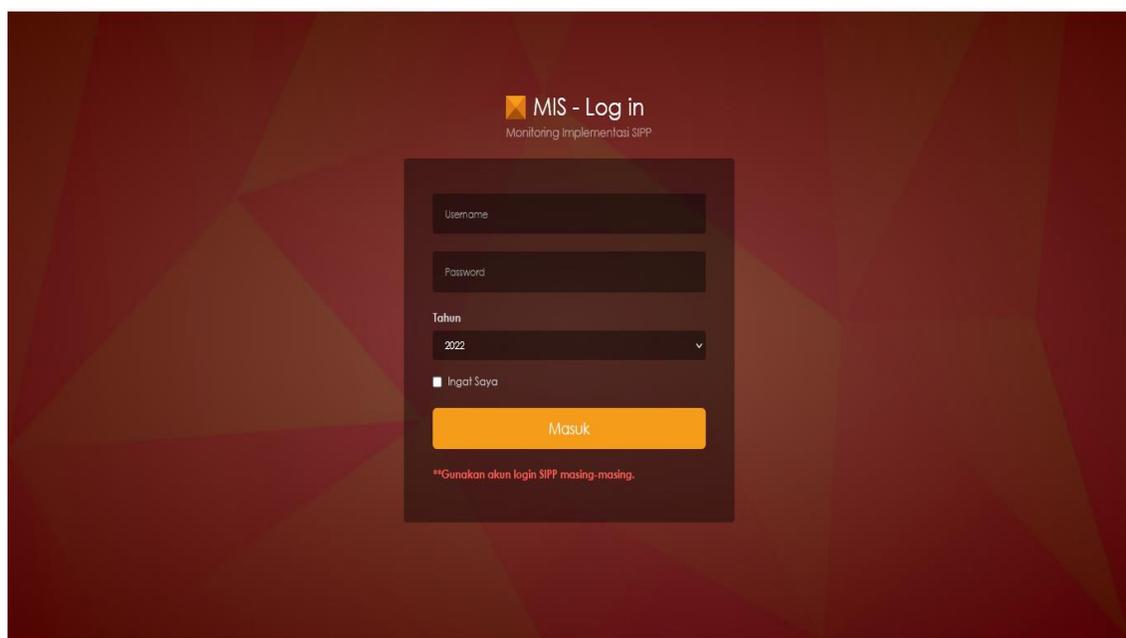
Aplikasi PTSP+ merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi petugas meja informasi PTSP pada Pengadilan Negeri. Aplikasi PTSP+ membantu dalam pelayanan surat masuk / keluar, buku tamu, penyitaan dan pengeledahan, serta surat keterangan yang terhubung dengan aplikasi Eraterang. Diharapkan dengan penerapan kedua aplikasi tersebut pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif dan efisien.



Gambar 4.14 Aplikasi PTSP

k. Aplikasi MIS

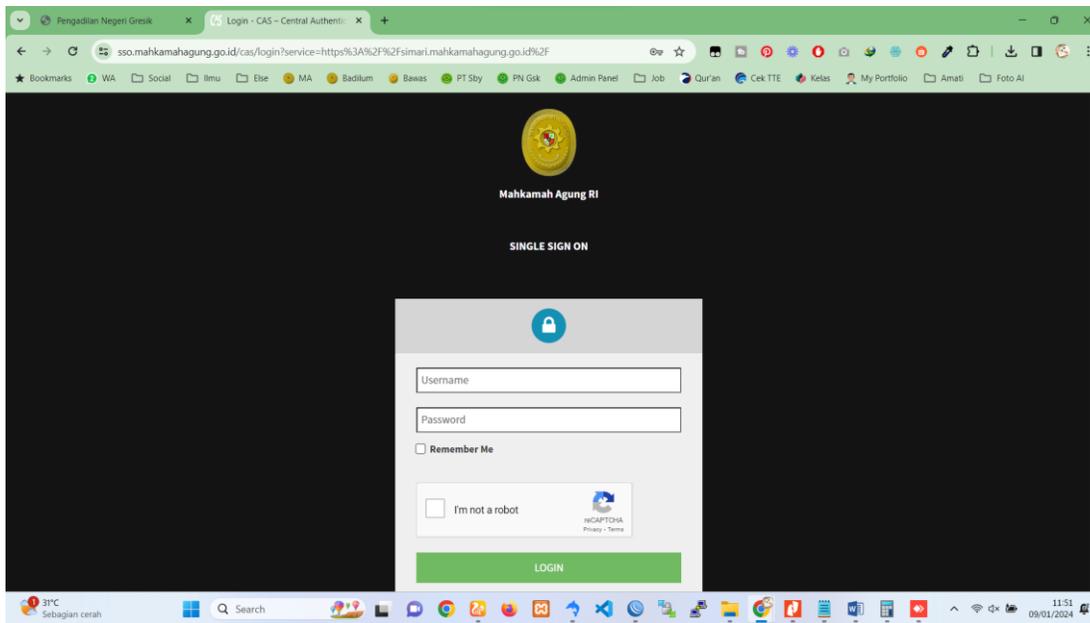
Aplikasi MIS merupakan aplikasi yang digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian SIPP, yang juga terintegrasi dengan Sistem Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam mengontrol kepatuhan penginputan data ke dalam aplikasi SIPP.



Gambar 4.15 Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)

1. Aplikasi SIMARI

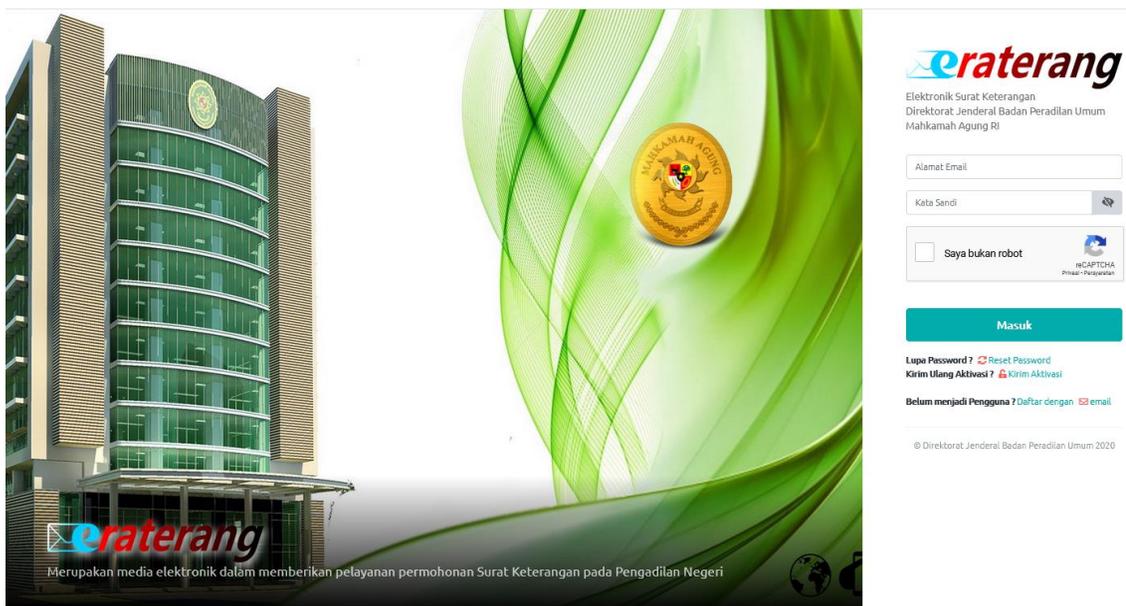
Aplikasi SIMARI ini sendiri merupakan aplikasi Mahkamah Agung yang meliputi pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) dan pengisian Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) untuk instansi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.



Gambar 4.16 Aplikasi SIMARI

m. Aplikasi Eraterang

Eraterang merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berguna untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan.



Gambar 4.17 Aplikasi ERATERANG

n. Aplikasi SIWAS

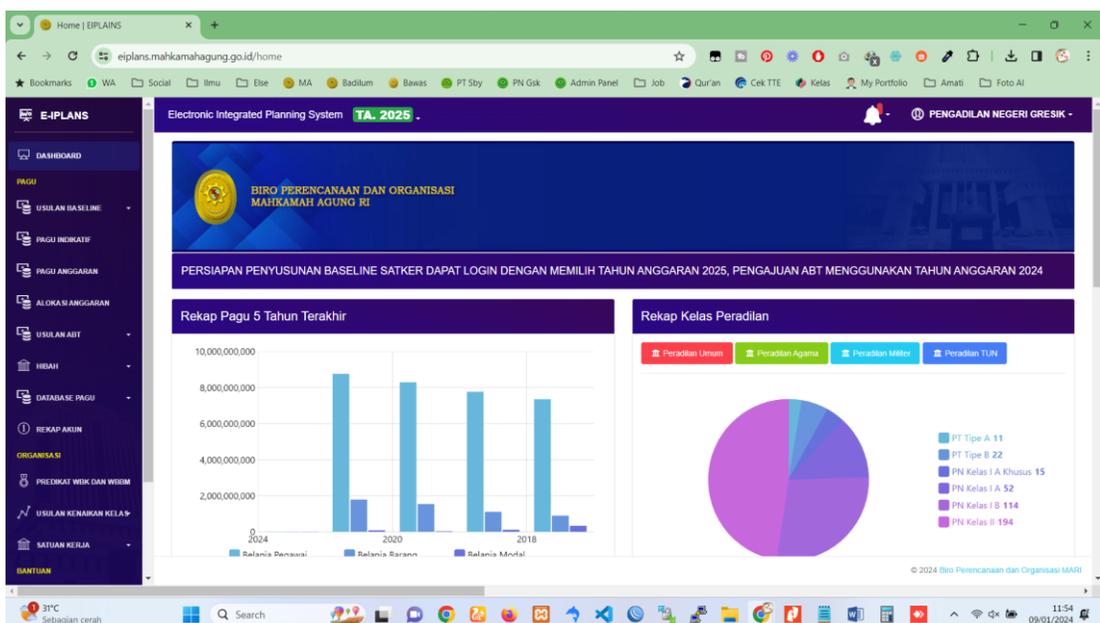
Aplikasi SIWAS adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.



Gambar 4.18 Aplikasi SIWAS

o. Aplikasi E-Iplans

Aplikasi e-IPLANS adalah sebuah sistem untuk menyusun Anggaran dengan tahapan berjenjang pada Satuan Kerja di Bawah Mahkamah Agung RI untuk persiapan penyusunan usulan baseline.



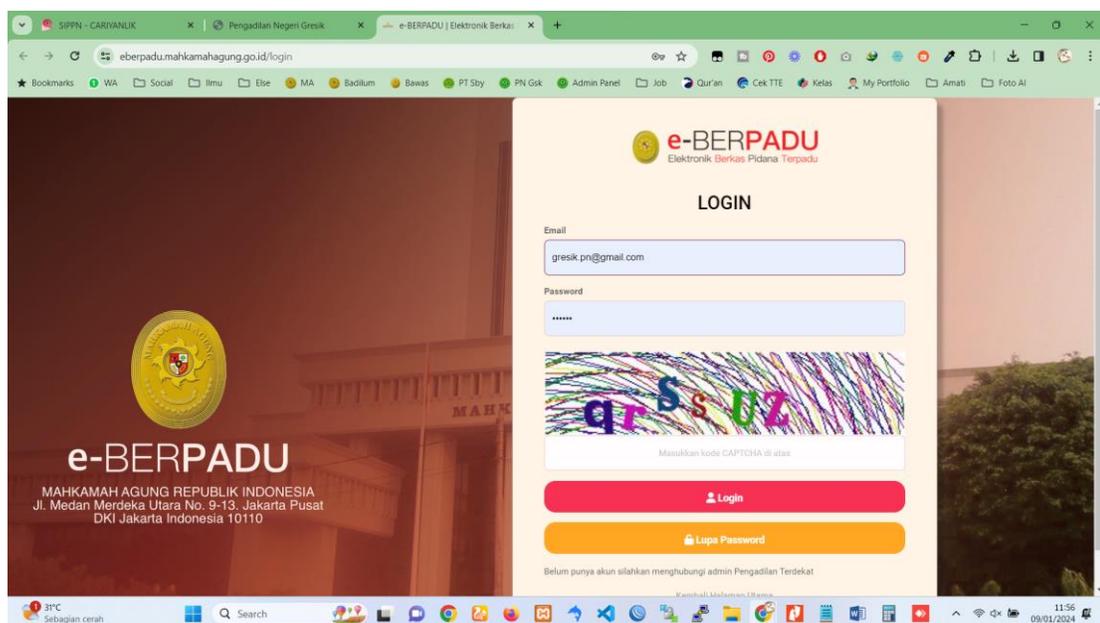
Gambar 4.19 Aplikasi E-IPLANS

p. Aplikasi E-Berpadu

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu.

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

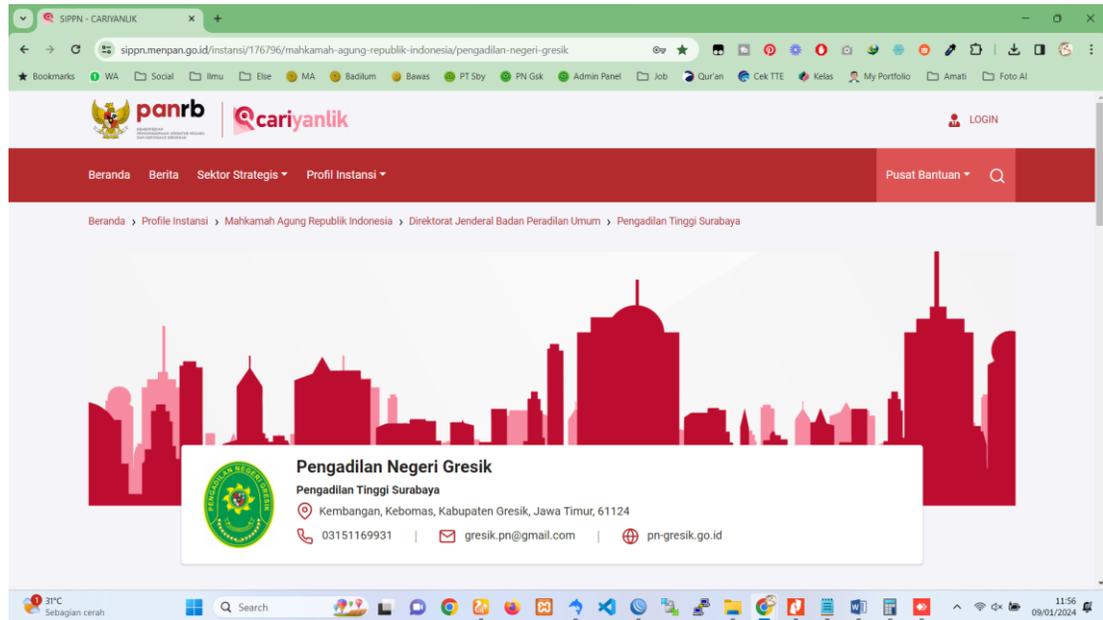
1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan



Gambar 4.20 Aplikasi e-Berpadu

q. Aplikasi SIPP Menpan

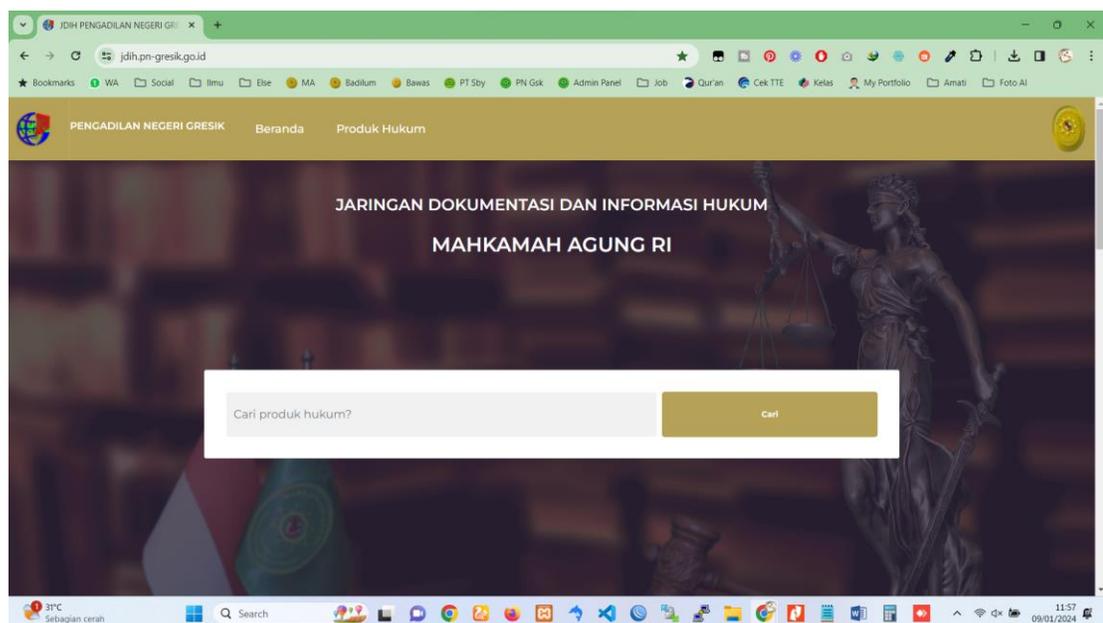
Aplikasi SIPP Menpan adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.



Gambar 4.21 Aplikasi SIPP Menpan

r. Aplikasi JDIH Mahkamah Agung

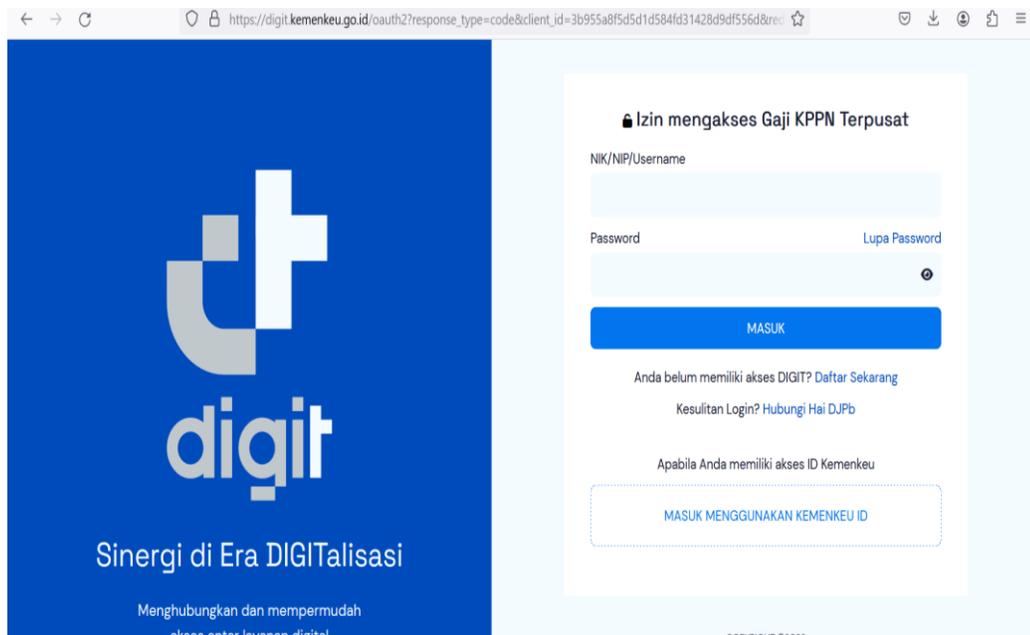
Aplikasi JDIH Mahkamah Agung adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.



Gambar 4.22 JDIH Pengadilan Negeri Gresik

s. Aplikasi Gaji Web

Aplikasi Gaji Satker Berbasis Web adalah aplikasi berbasis web yang dibuat sebagai pengganti dari aplikasi GPP yang berbasis desktop. Aplikasi Gaji Web digunakan oleh para satuan kerja untuk melakukan perhitungan gaji pokok atas Pegawai Negeri Sipil yang pembayaran gajinya dibebankan pada DIPA Pemerintah Pusat.



Gambar 4.23 Aplikasi Gaji Web

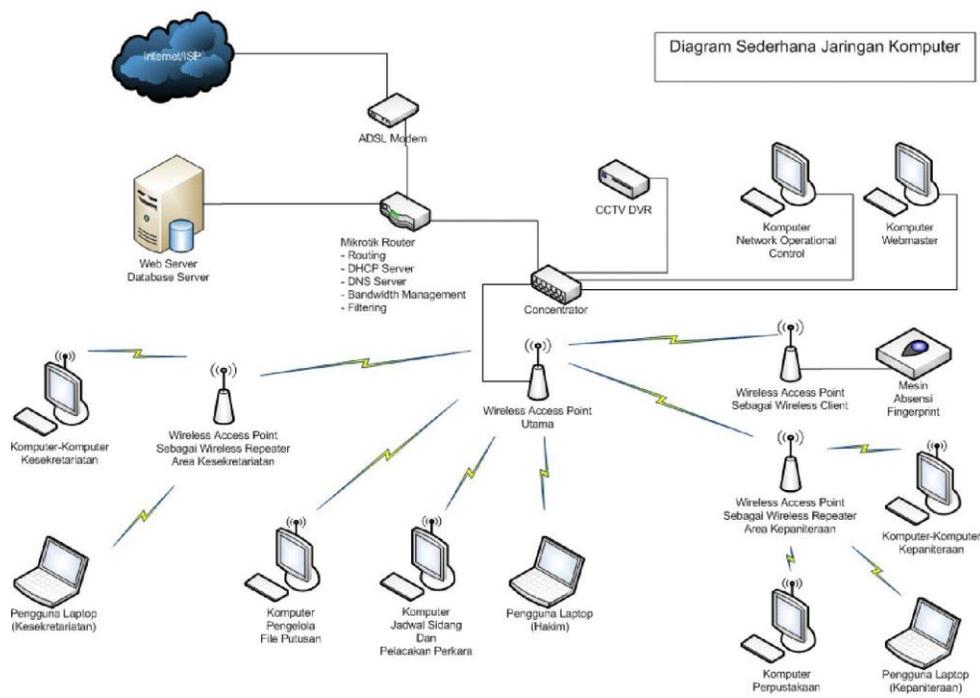
Untuk website, Pengadilan Negeri Gresik menyewa space hosting pada DOMAINESIA. Untuk domain **www.pn-gresik.go.id** mempergunakan layanan dari PANDI (Pengelola Alamat Domain Indonesia). Pilihan untuk menempatkan website pada penyedia layanan hosting swasta adalah menganut konsep Cost-Effective and Maintenance Free dengan artian bahwa Pengadilan Negeri Gresik tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk koneksi internet berkecepatan tinggi dan tidak perlu menyediakan perangkat server yang mahal untuk melayani akses website Pengadilan Negeri Gresik.

Akses SIPP yang di onlinekan dapat dilakukan dengan cara melakukan akses pada alamat sub-domain **sipp.pn-gresik.go.id**

Pengadilan Negeri Gresik berlangganan internet Intinet dengan besaran bandwidth sebesar 200 Mbps. Bandwidth tersebut merupakan paket berlangganan bandwidth dedicated 1:1.

Untuk menjamin pembagian bandwidth untuk download yang merata, maka telah dilakukan pengaturan dengan menggunakan Router Mikrotik RB 1100 dengan ketentuan batas maksimum untuk browsing internet adalah 5 Mbps dan batas maksimum untuk download file adalah 5 Mbps untuk setiap IP Address.

Hampir seluruh komputer pada Pengadilan Negeri Gresik tersambung pada jaringan lokal dengan menggunakan jaringan nirkabel. Penggunaan jaringan nirkabel dimaksudkan untuk Server kemudahan manajemen jaringan lokal.



Gambar 4.24 Diagram Sederhana Jaringan Komputer Pengadilan Negeri Gresik

3. Implementasi e- court di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik telah menyediakan fasilitas tambahan untuk membantu para pihak berperkara yang ingin memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik yakni Pelayanan Informasi E-Court. Layanan ini berada tepat di samping meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Pelayanan Informasi E-Court memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan hal - hal lainnya mengenai layanan E-Court. Namun lebih dari itu, ia juga akan membantu mendaftarkan akun pada E-Court dan memandu cara pendaftaran perkara melalui E-Court kepada para pencari keadilan, baik para Advokat maupun Non Advokat atau pengguna lainnya. Dengan adanya Pelayanan Informasi E-Court ini diharapkan dapat membantu para pencari keadilan mendapatkan layanan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Layanan yang disediakan meliputi :

- *E-filing* (pendaftaran perkara secara online)
- *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara secara online)
- *E-Summons* (Pemanggilan Pihak berperkara secara online)
- *E-Litigation* (Persidangan secara Online)

Pada Tahun 2023 di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mengimplementasikan *e-court* dengan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* sebanyak 361 perkara yang terdiri dari 231 perkara permohonan, 96 perkara gugatan, 30 perkara gugatan sederhana dan bantahan 5. Pengimplementasian layanan *e-court* di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA didukung dengan adanya fasilitas seperti pojok *e-court*, brosur *e-court* dll yang dapat mempermudah pencari keadilan untuk berperkara secara elektronik melalui *e-court*.



Gambar 4.25 Pelayanan Informasi E-court

4. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melacak sejauh mana proses perkara itu berjalan sehingga masyarakat bisa mengetahui proses perkara secara transparan dengan mudah dan cepat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh pimpinan di masing - masing satuan kerja maupun Pimpinan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mengimplementasikan SIPP dan secara rutin melakukan sinkronisasi data SIPP lokal dengan data SIPP Website, data SIPP Badilum serta data SIPP Mahkamah Agung minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari. Adapun rasio penanganan perkara per tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan data dari aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) sebesar 89,18 %.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITAS PENJAMIN MUTU

Yogyakarta, 14 September 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, Pengadilan Negeri Gresik untuk pertama kalinya mendapat penghargaan Akreditasi PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dan ISO 9001:2015 dari Dirjen Badilum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan predikat A (Excellent) Penghargaan Akreditasi ini di berikan langsung oleh Bpk. H. Suwardi, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (Bidang Non Yudisial), dan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik yaitu Bapak Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. periode 10 Febuari 2016 s.d 25 November 2021

Berikutnya pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Ketua Bapak Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum kembali Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapatkan penghargaan dengan predikat A (Excellent) yang dikirim langsung dari Dirjen Badilum Mahkammah Agung RI.

Seritifikat ini diberikan dengan tujuan saat itu agar mendorong pengadilan negeri sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan.



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
DAN IA TAHUN 2022.

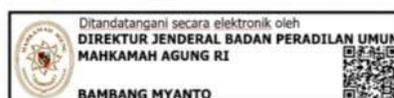
KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir
dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Gresik

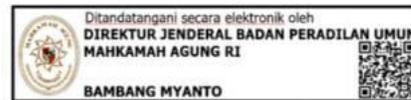


Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022**

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 72	dst.				
73	Pengadilan Negeri Gresik	IA	722	725	A
74 s/d 98	dst.				



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2/2

Gambar 5.1 Petikan Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu

Selain itu, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A pada tahun 2023, telah menerima beberapa penghargaan, di antaranya:

1. Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri Gresik sebagai Instansi Pelayanan Publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas Kabupaten Gresik, oleh Dinas Sosial Kab. Gresik;



Gambar 5.2 Penghargaan sebagai Instansi Pelayanan Publik Ramah Disabilitas Tahun 2023

2. Sertifikat Penghargaan kepada Pengadilan Negeri Gresik atas pencapaian sebagai satker tercepat III mendapatkan SHR dalam Rekonsiliasi Monsakti Periode Triwulan IV Tahun 2022;



Gambar 5.3 Sertifikat Penghargaan atas Pencapaian Tercepat III Rekonsiliasi Monsakti

3. Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri Gresik Sebagai Instansi pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas di kabupaten Gresik, oleh Bupati Gresik;



Gambar 5.4 Penghargaan sebagai Instansi Pelayanan Publik Ramah Disabilitas Tahun 2023 oleh Bupati Gresik

4. Piagam Penghargaan Peringkat Ke 2 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 periode Januari – Oktober 2023 pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya;



Gambar 5.5 Piagam Penghargaan Peringkat Ke 2 EIS di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya

5. Piagam Penghargaan atas pencapaian terbaik (99,4%) untuk kategori jumlah perkara > 2000 dalam Pelaksanaan Pelimpahan Berkas Perkara Melalui E-Berpadu pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.



Gambar 5.6 Piagam Penghargaan atas pencapaian terbaik (99,4%) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya

6. Piagam penghargaan atas Peringkat 3 Kategori Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.



Gambar 5.7 Piagam penghargaan atas Peringkat 3 Kategori POSBAKUM

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri/Hub Industrial Gresik Kelas IA sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri / Hub Industrial Gresik Kelas IA ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk :

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar

menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.



Gambar 5.8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

a. Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP

Dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Gresik berinovasi dengan membangun Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP. Inovasi ini mengadopsi inovasi yang telah dibangun sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP Pengadilan Tinggi Surabaya dimana inovasi ini memanfaatkan teknologi teleconference untuk mempertemukan pengguna layanan pengadilan dengan petugas PTSP. Dengan meminimalisir kontak secara langsung, inovasi ini diharapkan dapat menekan angka penularan Covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik.

Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP ini mempunyai sarana penunjang sebagai berikut:

1. PC sebanyak 6 unit, masing-masing untuk layanan Umum, Perdata, Pidana, Hukum, PHI, e-Court, dan SIWAS;
2. Printer sebanyak 1 unit;
3. Rak dokumen sebanyak 1 unit;
4. Sarana pendukung lainnya seperti kursi, AC, dan jaringan internet.



Gambar 5.9 Pelayanan Anjungan Mandiri PTSP

b. Gus Prima

Gus Prima merupakan aplikasi asisten virtual milik Pengadilan Negeri Gresik yang dapat digunakan baik oleh pihak eksternal (pengguna layanan pengadilan) maupun pihak internal Pengadilan Negeri Gresik. Bagi pihak eksternal, Gus Prima dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai status perkara, jadwal sidang, persyaratan layanan, dll. Bagi pihak internal, Gus Prima berfungsi sebagai reminder (pengingat) jadwal sidang, notifikasi MIS, notifikasi surat masuk, dll. Gus Prima dapat digunakan dengan menghubungi nomor **081131134545**.

c. Barcode Persyaratan Layanan Pengadilan

Barcode persyaratan layanan pengadilan merupakan upaya Pengadilan Negeri Gresik untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan. Barcode pelayanan ini tersedia di Lobi Utama maupun Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Negeri Gresik serta pada website Pengadilan Negeri Gresik. Kini pengguna layanan pengadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan cukup dengan men-scan barcode tersebut. Barcode persyaratan layanan pengadilan dapat yang terdapat pada website Pengadilan Negeri Gresik dapat diakses melalui tautan <https://pn-gresik.go.id/detail-pengumuman-92-barcode-persyaratan-layanan-pengadilan>.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai pengawasan ini, Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080/SK/VIII/2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- PENGAWASAN MELEKAT

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri Gresik, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : W.14.U.31/135/OT.00/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Jubir, dan Humas Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Nama Hakim Pengawas

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS
1.	Sarudi, S.H	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Agung Nugroho Suryo. S, S.H., M. Hum	Hakim	Pengawas Bidang Perdata
3.	Fifiyanti, S.H.M.H M. Aunur Rofiq, S.H., M.H	Hakim	Hakim Telaah Eksekusi
4.	Sri Sulastuti, SH	Hakim	Pengawas Bidang Hukum
5.	Sri Hariyani, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Pidana
6.	Etri Widayati, SH., MH	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial
7.	Ari Karlina,S.H.,M.H. Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
8.	Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
9.	Dyah Sutji Imani, S.H. Efrida Yanti, S.H., M.H .	Hakim	Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala
10	Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H.	Hakim	Pengawas Panggilan Delegasi
11	Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. Bagus Trenggono, S.H.,M.H.	Hakim	Pengawas PTSP

12	Adhi Satrija Nugroho,S.H.	Hakim	Hakim Pengawas dan Pengamat (Kim Wasmat)
13	A.A Ayu Christin Agustini, SH.MH	Hakim	Pengawas SIPP

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Surabaya dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Pengadilan Negeri Gresik telah dilakukan pembinaan dan Pembinaan oleh team Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

- **PENGAWASAN FUNGSIONAL**

Pengawasan fungsional telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. EVALUASI

Sesuai hasil pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengawasan oleh para pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, Bahwa pada dasarnya semua administrasi dalam keadaan baik, namun masih perlu pembenahan yang lebih baik di bidang kepaniteraan dan di bidang kesekretariatan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Gresik pada Tahun 2023 tetap melanjutkan program - program yang telah berlangsung pada Tahun 2014 dimana Mahkamah Agung RI mulai giat menggalakkan teknologi informasi disegala bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan.

Program Mahkamah Agung RI antara lain E-Document, E-litigation, SIPP, Simak, Desk Info / PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), E-Court dan Sistem Administrasi Keuangan, memacu pengadilan Negeri Gresik untuk mengikuti semua perubahan-perubahan tersebut.

Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur maupun anggaran pada Pengadilan Negeri Gresik yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, yang dituangkan dalam laporan tahunan 2023.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas pada Pengadilan Negeri Gresik terutama untuk mendukung IT diperlukan infrastruktur yang berbasis teknologi dan SDM yang berkualitas sehingga keluaran dari input yang diterima akan maksimal dan berkualitas lebih.

B. REKOMENDASI

Di mohon kiranya :

1. Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (IT).
2. Peningkatan kualitas SDM dan pelaksanaan tugas kepegawaian dengan diadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala.
3. Menambah jumlah pegawai, dikarenakan jumlah pegawai yang ada saat ini terbatas, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Gresik kurang maksimal.
4. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gresik dari Mahkamah agung Republik Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Demikian laporan pelaksanaan tugas Tahun 2023 sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gresik yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/ fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf pelaksana yang telah berupaya untuk mencapai target yang sesuai program kerja yang telah tersusun.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi dan kajian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan tugas untuk masa yang akan datang lebih baik.

Demikian dan terima kasih.

Gresik, 16 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial Gresik Kelas IA



I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

LAMPIRAN



CLOSING MEETING ASSESMENT INTERNAL SEMESTER I TAHUN 2023



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN APM SEMESTER I TAHUN 2023



RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN



PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG SECARA DARING



RAPAT HAKIM PENGAWAS BIDANG



JALAN SEHAT JUMAT PAGI



RAPAT BERJENJANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN



BRIEFING PAGI / PEMBINAAN HARIAN PETUGAS PELAYANAN



RAPAT PEMILIHAN PEMBERIAN REWARD



KEGIATAN PEMBERIAN REWARD KEPADA HAKIM, PEJABAT FUNGSIONAL, ASN, HONORER DAN PETUGAS PTSP YANG BERKINERJA TERBAIK



KEGIATAN APEL RUTIN SENIN PAGI



KEGIATAN APEL RUTIN JUMAT SORE



RANGKAIAN KEGIATAN LOMBA 17 AGUSTUS



RANGKAIAN KEGIATAN LOMBA 17 AGUSTUS



PENERIMAAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI GRESIK



UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI PAHLAWAN